

Yayasan Tifa adalah organisasi pemberi hibah yang bekerja untuk mempromosikan masyarakat terbuka, dengan berperan aktif menguatkan masyarakat sipil di Indonesia. Visi kami adalah sebuah komunitas dimana penduduk, pemerintah, dan sektor bisnis mendukung hak-hak individu khususnya hak dan pandangan kaum perempuan, minoritas dan kelompok marjinal lainnya, serta mendukung dan memupuk solidaritas dan tata pemerintahan yang baik. Misi kami adalah memperjuangkan masyarakat terbuka di Indonesia yang menghormati keragaman serta menjunjung tinggi penegakan hukum, keadilan dan persamaan.

Yayasan Tifa
Jl. Jaya Mandala II No. 14E Menteng Dalam
South Jakarta, 12870 Indonesia
Tel : (62) 021 829 2776 | Fax : (62) 021 837 83648
Email: public@tifafoundation.org



**memperkuat akar dan
meningkatkan kualitas demokrasi**

Laporan Tahunan 2012

MEMPERKUAT AKAR & MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI

DAFTAR ISI

01

Pengantar tentang Tifa

- Memperkuat Kualitas Demokrasi 04
- Menengok dinamika organisasi 04
- Struktur organisasi 06
- Kegiatan Internasional 09
- Kinerja Hibah 10

10

Program

- Demokrasi & Tata Pemerintahan 13
- Partisipasi Warga dalam Demokrasi Elektoral 13
- Testimoni kegiatan Yayasan Maupe 14
- Pemerintahan yang Responsif dan Akuntabel 16
- Testimoni kegiatan ELSAKA 19
- Media & Informasi 20
- Kebebasan Media dan Berekspre sebagai Syarat Demokrasi 20
- Testimoni kegiatan AJI Ambon 21
- Profesionalisme Media untuk Menjamin Kebebasan Arus Informasi 21
- Testimoni kegiatan Perhimpunan Filantropi Indonesia 22
- Dukungan Media untuk Isu Strategis 24
- Testimoni kegiatan Teater Garasi 24
- Penggunaan Hak Memperoleh Informasi dalam Advokasi Publik 25
- Testimoni kegiatan LBH Semarang 25
- Program Hak Asasi Manusia & Keadilan 28
- Akses Terhadap Keadilan 28
- Testimoni kegiatan LBH Padang 30
- Keadilan Transisional 32
- Testimoni kegiatan KKPK 33
- Kewarganegaraan dan Kesetaraan 34
- Testimoni kegiatan Epistema Institute 35
- Promosi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 37
- Testimoni kegiatan CEES 37
- Program Perlindungan Buruh Migran Indonesia 39
- Akses Terhadap Keadilan 40
- Akses Terhadap Keuangan 41
- Akses Informasi 44

46

Daftar Mitra dan Kegiatan

54

Publikasi

56

Laporan Keuangan

Laporan Tahunan 2012

PENGANTAR TENTANG TIFA

Memperkuat Kualitas Demokrasi

Pada tahun 2012, Tifa menegaskan demokrasi yang berkualitas sebagai sebuah kerangka kerja yang menjadi arahan strategis dalam program-programnya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana Tifa berbicara tentang konsolidasi demokrasi, kali ini Tifa bicara tentang Kualitas Demokrasi. Kualitas demokrasi berbicara tidak hanya tentang demokrasi elektoral, namun juga berbicara tentang jaminan atas kebebasan, persamaan politik, dan *popular control* terhadap kebijakan publik. Demokrasi yang berkualitas adalah demokrasi yang memiliki legitimasi luas dan memuaskan harapan warga negara terhadap pemerintahan. Demokrasi yang berkualitas berarti memastikan warga negara memiliki kekuasaan yang berdaulat untuk mengevaluasi apakah pemerintah menyediakan kebebasan dan persamaan di dalam hukum.

Dalam konteks ini, warga negara ditempatkan sebagai salah satu penyeimbang kekuasaan yang cenderung korup dan otoriter. Warga kemudian didorong untuk melakukan kontrol dan daya tawar sehingga negara bisa menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak warga dan memberikan pelayanan publik, yang pada akhirnya bisa berkontribusi positif kepada kesejahteraan warga.

Gagasan tentang kualitas demokrasi inilah yang kemudian diterjemahkan oleh 4 (empat) program utama Tifa: Demokrasi & Pemerintahan, Media & Informasi, Hak Asasi Manusia & Keadilan, dan Perlindungan Buruh Migran dalam berbagai inisiatif.

Program-program Tifa kemudian diarahkan untuk:

1) Mendorong pemencaran

kekuasaan, 2) Mendobrak oligarki, 3) Memunculkan pemimpin-pemimpin alternatif baru di berbagai tingkatan.

Keseluruhan arahan ini dilakukan untuk memastikan kekuatan-kekuatan yang ada berada didalam relasi yang setara dan memiliki kemampuan untuk saling mengontrol. Dengan demikian demokrasi berada pada equilibriumnya.

Hal ini yang menegaskan kembali strategi Tifa untuk senantiasa mendukung dan memperkuat masyarakat sipil di Indonesia.

Menengok Dinamika Organisasi

Sejak Oktober 2012, Yayasan Tifa mengalami pergantian tampuk kepemimpinan. Tri Nugroho yang sudah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Tifa sejak tahun 2007, digantikan oleh Irman G. Lanti pada bulan Oktober tahun 2012 silam. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan bisa membawa angin segar dan mempercepat akselerasi gerak Yayasan Tifa di Indonesia.

Di tahun 2012, Tifa juga memfokuskan diri pada upaya evaluasi dan refleksi, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana inisiatif yang didukung berkontribusi pada pengembangan kualitas demokrasi di Indonesia. Evaluasi tematik dilakukan untuk topik dukungan terhadap audit sosial, dukungan terhadap pengembangan Community Based Organization (CBO) sebagai salah satu pilar perlindungan buruh migran di daerah asal, evaluasi terhadap dukungan untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan evaluasi terhadap dukungan Tifa pada program-program terkait Pemilu. Tifa juga mulai mendokumentasikan beberapa pembelajaran dari lapangan dalam berbagai media: film untuk audit sosial

di Sulawesi Selatan dan Sukabumi, film pendek terkait dengan FOI dan Pilkada Jakarta, dan dokumentasi praktek terbaik dari audit sosial di Sulawesi Selatan.



Struktur Organisasi

(Organizational Structure)

Pembina (Board of Trustees)

Ketua (Chairman):	Felia Salim
Anggota (Members):	Goenawan Mohammad Todung Mulya Lubis Daniel Dhakidae

Pengawas (Board of Supervisors)

Pengurus (Board of Directors)

Ketua (Chairman):	Yuli Ismartono
Wakil Ketua (Vice Chairman):	Lukas Luwarso
Anggota (Members):	Luthfi Assyaukanie Ifdhal Kasim Pater Neles Tebay Miryam Nainggolan Riefqi Muna Debra Yatim

Direktur Eksekutif (Executive Director)

Irman Lanti

Program (Programs)

Demokrasi dan Tata Pemerintahan (Democracy and Governance)

Program Manager:	Mickael Bobby Hoelman
Program Officer:	Herryadi

Media & Information

Program Manager:	R. Kristiawan
Program Officer:	Tanti Budi Suryani

Hak Asasi Manusia dan Keadilan (Human Rights and Justice)

Program Manager:	Renata Arianingtyas
Program Officer:	Samuel Gultom

Buruh Migran (Migrant Workers)

Empowering Women Overseas Migrant Workers Project

Project Manager:	Riana Puspasari
Access to Finance Officer:	Burhanuddin Zein
Access to Justice Officer:	Eddy Purwanto
Field Officer Indramayu:	Nurhadi
Field Officer Banyuwangi:	Sugito
Finance and Admin Officer:	Sendang Rukmi
Project Secretary:	Natalia Putri
Project Secretary:	Narsih
Office Staff:	Sartiman Hermantoro

Poverty Reduction through Safety in Migration: A Pilot Initiative

Project Manager:	Muhamad Nour
Access to Justice Specialist:	Wirawan
Access to Finance Specialist:	Khres Senduk
Gender Specialist:	Isja Dini Uljati
Monitoring and Evaluation Specialist:	Nani Vindanita Ekasari
Project Officer NTT:	Yohanes Victor Usbobo
Project Officer NTB:	Muhammad Shaleh
Field Officer Belu:	Yohanes Berchmans Bria
Grant, Finance and Admin Officer:	Debora Meice Siano

Keuangan, Grant dan Administrasi (Finance, Grant and Administration)

Finance Manager:	Ezra Kaban
Treasurer:	Anugrah Nindita
Accountant:	Ruben Tedjasukmana

Grant and Knowledge Manager:

Senior Grant Officer:	Sri Aryani
Grant Officer:	Yeni Oktriani
Program Administrative Staff:	Anela Eka Sari Maya Marlin

Office and Human Resources Manager:

Information Communication Technology & Office Administrator:	Riza Boris S.
Secretary/Receptionist:	Ferry Fernando Vita Airlanggia
Office Staff:	Fathurrahman
Security Officer:	Tukijan
Office Boy:	Moh. Muhajirin
Driver:	Nazwir
Chef:	Sulistiani

Laporan Tahunan 2012

PROGRAM



DEMOKRASI DAN TATA PEMERINTAHAN

Program Demokrasi dan Tata Pemerintahan meletakkan dua prioritas program:

- 1) partisipasi warga dalam demokrasi elektoral, dan
- 2) pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Partisipasi Warga dalam Demokrasi Elektoral

Di prioritas program partisipasi warga dalam demokrasi elektoral ada dua hal yang ingin dicapai. Pertama, memampukan pemilih untuk memengaruhi proses rekrutmen kandidat dan menyampaikan aspirasi mereka, dan kedua untuk menumbuhkan pemimpin-pemimpin baru yang berasal dari kalangan masyarakat sipil.

Tifa memberikan dukungan untuk inisiatif pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dukungan ini diberikan untuk Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta. Ketiga organisasi ini menjalankan program civic education kepada kalangan pemilih, dengan beragam strategi.

JPPR misalnya menggandeng ustad dan ustadzah untuk membantu

menyebarkan pesan-pesan kepada calon pemilih. JPPR melatih para ustad dan ustadzah terpilih, yang kemudian menyampaikan materi pendidikan pemilih yang diselipkan dalam kegiatan pengajian rutin yang mereka datangi.

Sementara itu, PBHI Jakarta memfasilitasi warga untuk menyusun kriteria calon gubernur ideal dan memfasilitasi warga untuk memantau rekam jejak secara aktif. Warga juga diajak untuk berdialog langsung dengan kandidat gubernur. Warga yang terlibat dalam program adalah anggota komunitas yang sebelumnya juga terlibat dalam program PBHI dengan dukungan Tifa di lima wilayah di Jakarta. Program sebelumnya terbilang sukses dalam menumbuhkan sikap kritis dan keberanian warga untuk menuntut hak-haknya, memiliki kemampuan untuk membela (advokasi) persoalan warga, dan berkomunikasi dengan anggota DPRD yang berlanjut dengan tindakan membantu menyelesaikan persoalan warga.

Untuk melengkapi *civic education* yang dilakukan oleh JPPR dan PBHI Jakarta, KIPP juga mendidik warga untuk menjadi pemilih cerdas sekaligus memiliki komitmen dan terampil memantau pelaksanaan pemilu. Diharapkan dengan jejaring pemantau pemilu yang luas, tingkat kecurangan baik dari penyelenggara maupun peserta Pemilu bisa dikurangi.

Masih terkait dengan Pilkada Jakarta, Yayasan Komunikatif membuat film dokumenter pra-pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dokumenter ini menggambarkan kondisi masyarakat marjinal di Jakarta serta upaya-upaya warga agar dapat turut berpartisipasi dalam pemilihan.

Selain mendukung inisiatif terkait dengan Pilkada Jakarta, Tifa juga mendukung upaya warga Jombang untuk meningkatkan daya tawar warga sehingga bisa mempengaruhi proses Kandidasi dalam Pilkada Jombang 2013. Diharapkan inisiatif yang

digagas oleh Perkumpulan ALHARAKA ini menjadi salah satu model tentang penguatan daya tawar warga – tidak hanya dalam proses pemilihan, namun sebelum kandidat ditetapkan.

Tifa juga mendukung Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) yang berupaya memantau kinerja anggota DPR, dan mendiseminasikan hasil pemantauannya kepada publik. Diharapkan, konstituen mendapatkan informasi yang memadai dan dapat menilai wakil rakyat yang ada, dan bisa cerdas memilih di periode Pemilu 2014 mendatang.

Sebagai persiapan menjelang Pemilu 2014, juga dilakukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dengan dukungan Tifa, Perludem mendorong konsolidasi di kalangan masyarakat sipil untuk sama-sama menyiapkan Pemilu 2014. Konsolidasi ini diharapkan bisa menyatukan berbagai kelompok masyarakat sipil yang kian jarang bekerja lintas sektoral untuk isu-isu yang menjadi kepentingan

bersama, sekaligus mendorong pendekatan baru dalam merespon kondisi yang ada saat ini.

Tifa juga berkontribusi pada pelaksanaan Kongres Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ke XII di Samarinda, 2012 silam. Selain itu, program prioritas ini juga memberi perhatian khusus pada tema Perempuan & Politik.

Di Sumatera Utara, Tifa mendukung Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) yang mendidik anggota Serikat Perempuan HAPSARI untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan dialog langsung dengan eksekutif dan legislatif. HAPSARI juga menyiapkan tiga serikat perempuan agar memiliki kompetensi untuk mempengaruhi pemerintah dan parlemen. Dengan dua strategi ini diharapkan pemerintah lebih responsif terhadap isu-isu yang dekat dengan perempuan: kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penghapusan kekerasan

terhadap perempuan.

Tifa juga mendukung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Untuk Perempuan (MAUPE) di Sulawesi Selatan dan Solidaritas Perempuan (SP) Kendari di Sulawesi Tenggara. Kedua organisasi ini menyiapkan pemilih dalam Pilkada Gubernur 2012. SP Kendari mendorong pemilih menyusun kriteria gubernur yang pro-perempuan dan memfasilitasi dialog dengan kandidat gubernur. Sedangkan Maupe –dengan pendekatan pendidikan sebaya, mendorong pendidikan pemilih khusus bagi perempuan di Maros, Sulawesi Selatan. Selain memberikan pendidikan pemilih cerdas, Maupe juga berusaha membongkar paradigma yang bias gender. Alhasil, selain partisipasi perempuan dalam pemilu meningkat, perempuan yang dididik juga bisa aktif mengadvokasi kepentingan warga. Kini mereka membentuk Jaringan Perempuan Maros, dan mendirikan posko aspirasi warga di 6 desa.

“Dengan posko ini kami bisa leluasa berbagi kabar. Kami bisa sampaikan keinginan, keluhan. Kami sudah bicara di depan umum. Biasa mengadu tentang kondisi jalan, mengadu tentang program rehab rumah warga. Kami sampaikan keluhan perempuan, sebelumnya tidak pernah.”

(Hajrah, perempuan paruh baya asal dusun Mangngai, Desa Damai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan).

Melalui pelatihan dan pendampingan politik oleh Yayasan Maupe, kaum perempuan mulai memahami pentingnya partisipasi mereka dalam politik. Di desa ini, kaum perempuan alumni pelatihan fasilitator desa dan pendidikan sebaya mendirikan posko yang dinamakan **“Posko Aspirasi Perempuan Damai”** sebagai tempat untuk bertukar pikiran dan menyampaikan aspirasi politik antar sesama warga.



Hajrah bersama perempuan dari Desa Damai dan Lekopancing, Maros.
Foto oleh Kamaruddin Azis, Yayasan COMMIT Makassar.



Pemerintahan yang Responsif dan Akuntabel

Prioritas program kedua, Pemerintahan yang Responsif dan Akuntabel, ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran dan memperluas partisipasi publik dalam melakukan pemantauan dan evaluasi program pembangunan.

Untuk memenuhi tujuan ini, di tahun 2012, Tifa mendukung 14 mitra di berbagai wilayah. Delapan mitra

secara khusus bekerja untuk melakukan audit sosial di berbagai sektor. Audit sosial adalah pendekatan yang diadaptasi Tifa di Indonesia untuk mendorong akuntabilitas program pemerintah. Dalam audit sosial yang dikembangkan Tifa, warga didorong untuk memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian dan mendialogkan hasilnya dengan institusi terkait.

Di Sulawesi Selatan misalnya, audit sosial yang dikembangkan Yayasan Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) dengan

dukungan Tifa sejak tahun 2011, berhasil membuat audit sosial menjadi metode penilaian kinerja pemerintah kota Makassar. Audit sosial yang dilakukan YKPM berhasil mengoreksi beberapa program pembangunan dan menginisiasi beberapa program baru yang sesuai dengan kebutuhan. Di periode kedua, 2012 - 2013 audit sosial dilakukan bersama oleh warga dan staf pemerintah daerah. YKPM bahkan berhasil memfasilitasi warga melakukan tanggung gugat langsung kepada Walikota.

Sementara itu di Aceh, Yayasan Pusat Gerakan dan Advokasi Rakyat (PUGAR) melakukan audit sosial untuk sektor kesehatan. Di Aceh, audit sosial dilakukan agar kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebagai wujud jaminan sosial (social security program) dapat berjalan berkelanjutan tanpa meninggalkan akuntabilitasnya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan JKA yang muncul di lapangan, namun karena ketiadaan ruang untuk melakukan pendampingan dan advokasi maka

masalah-masalah tersebut menjadi tidak terekplorasi secara mendalam, upaya penyelesaian yang memuaskan bagi warga masih minim. Pada tahun kedua ini, kemitraan lanjutan berupaya membuka ruang bagi warga guna melakukan advokasi terhadap temuan-temuan dalam audit sosial yang langsung menyangkut hak kesehatan mereka.

Audit sosial untuk JPKMS (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat), juga dilakukan Lembaga Studi Dan Advokasi Kebijakan (Elsaka) di

Medan. Audit sosial juga mendorong perubahan dari penyelenggara layanan. Di tahun sebelumnya, temuan audit yang memperlihatkan kecacauan dalam pendataan membuat dinas kesehatan mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan warga yang tidak memiliki Kartu Medan Sehat untuk mendapatkan layanan JPKMS, kini bisa ikut mengakses jika meminta surat keterangan dari dinas kesehatan. Kini, di Medan juga sudah terbentuk 5 pos pengaduan layanan JPKMS yang mampu mengadvokasi warganya sendiri dalam memperoleh



Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, secara langsung melaporkan kinerja kebijakan lokal melalui laporan akuntabilitas sosial di depan warganya. Foto oleh Mickael B. Hoelman, Pengampu Program Demokrasi & Tata Pemerintahan, Yayasan Tifa

layanan JPKMS. Beberapa kasus yang diadvokasi oleh pos pengaduan adalah operasi kista, operasi melahirkan, anak gizi buruk, korban kebakaran, anak demam tinggi (step), sakit jantung, dan kanker rahim. Di tahun 2012, selain terus memperluas jangkauan audit sosial, termasuk memperbanyak pos pengaduan 5 layanan JPKMS, di kota Medan, program juga didorong untuk melakukan advokasi kebijakan yang memastikan landasan hukum bagi JPKMS.

Di Sumatera Utara dan Jawa Timur, audit sosial dilakukan untuk sektor corporate social responsibility (CSR). Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut melakukan audit sosial di sektor perkebunan, sementara FITRA Jawa Timur melakukan audit sosial CSR perusahaan minyak di Tuban. Di Garut, audit sosial digunakan sebagai pendekatan untuk memantau program pembangunan pemerintah daerah oleh Garut Governance Watch (G2W). Secara khusus, G2W

mengevaluasi program yang didanai APBD dengan melihat legitimasi serta efektivitas program dengan kebutuhan warga. Di Yogyakarta, Tifa bersama Yayasan Aksara menginisiasi audit sosial untuk program Jaminan Persalinan (Jampersal). Malang Corruption Watch (MCW) menawarkan model Constituent Meeting sebagai salah satu cara untuk mengawasi Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendidikan di kota Malang.

Di Sumbawa, Tifa mendukung Yayasan Boan untuk mengembangkan model Jaminan Sosial yang menysasar pekerja informal.

Melihat pentingnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, Tifa kemudian mendukung Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD) untuk melakukan kajian kritis dan advokasi terhadap draft revisi UU No. 32/2004, dan mendukung Institute for Research and Empowerment (IRE)

yang melakukan Advokasi tentang RUU Desa. Masih mengenai pengkajian UU, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) melakukan pemetaan dan analisis terhadap berbagai UU politik yang dikaji oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat Papua (KIPRA) mendukung masyarakat sipil dengan menguatkan kapasitas mereka dalam mengelola pembangunan di daerah, guna mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Tifa juga mendukung Amrta Institute for Water Literacy yang melakukan penelitian dan advokasi terhadap hak atas air. Advokasi hak atas air dianggap penting karena pendapatan air pajak tidak optimal sementara kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan terjadi. Di lingkungan urban seperti di Jakarta, tiap tahun amblesan tanah terus

bertambah karena eksploitasi tanah berlebihan. Sementara di lingkungan rural seperti Sukabumi eksploitasi air tanah dilakukan oleh industri milik perusahaan multinasional dengan nilai yang fantastis, namun pemerintah daerah tidak mampu menarik pajak yang memadai. Ironisnya, warga sekitar justru kesulitan mendapatkan air dan hidup dalam kemiskinan. Dalam program ini, Amrta kemudian mempelajari praktik-praktik terbaik pengelolaan air dari daerah-daerah lain dan kota-kota di dunia. Dengan melibatkan warga, studi diharapkan bisa dikembangkan menjadi strategi pengelolaan air yang menjadi solusi

bagi persoalan yang sesuai dengan karakteristik lokal, sekaligus bisa menjadi model pengelolaan air bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Masih terkait dengan sumberdaya alam, Tifa mendukung Koalisi Nasional Publish What You Pay (PWYP) menggelar sebuah pertemuan nasional, rapat umum anggota Koalisi Publish What You Pay. Koalisi PWYP Indonesia adalah koalisi empat puluh organisasi nasional masyarakat sipil didirikan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pada sektor ekstraksi sumberdaya migas dan pertambangan. Setelah melewati tiga tahun periode

kepengurusan koalisi nasional, dipandang perlu untuk mengevaluasi apakah strategi advokasi yang ada saat ini sudah memadai untuk merespon berbagai tuntutan perubahan.

Di penghujung tahun 2012, Tifa mendukung Institute for Strategic Initiatives (ISI). ISI akan melakukan studi untuk melihat kembali inisiatif reformasi pemerintahan daerah yang dijalankan di Indonesia dan menemukenali; faktor-faktor yang mendukung reformasi pemerintahan di daerah; dan kapasitas keterlibatan masyarakat sipil di daerah dalam tata pemerintahan daerah.

“Dengan bantuan ELSAKA, saya tidak harus dikenakan biaya Rumah Sakit sedikitpun untuk mendapatkan perawatan. Berkat pertolongan ELSAKA memasukkan saya dalam program Medan Sehat, saya dapat tertolong dan sekarang saya sudah sembuh dan terhindar dari maut.”

(Nirwan, warga kota Medan, Sumatera Utara)

Salah satu kegiatan ELSAKA adalah mengawasi pelaksanaan program JPKMS di kota Medan dan melakukan audit-audit sosial terhadap kebijakan Pemerintah untuk rakyat. ELSAKA memantau dan mendata segala bentuk penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit kepada pasien, khususnya pengguna kartu Medan Sehat, dan melaporkannya kepada pihak pemerintah selaku penyelenggara program JPKMS dan kepada DPR selaku pengawas program.



MEDIA DAN INFORMASI

Di tahun 2012, program Media & Informasi memiliki 4 prioritas program: 1) kebebasan media dan berekspresi sebagai syarat demokrasi, 2) profesionalisme media untuk menjamin kebebasan arus informasi, 3) dukungan media untuk isu strategis, dan 4) penggunaan hak memperoleh informasi dalam advokasi publik

Kebebasan Media dan Berekspressi sebagai Syarat Demokrasi

Prioritas program pertama bertujuan untuk menyediakan sistem hukum yang melindungi kebebasan media dan berekspresi dan memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap aktivitas kebebasan media dan kebebasan berekspresi. Prioritas program ini juga mendorong terciptanya lingkungan pendukung bagi kebebasan media dan kebebasan berekspresi. Dukungan kemudian diberikan Tifa untuk memperkuat jaringan advokat pers dan advokasi kebijakan terkait pers di Indonesia.

Di tahun 2012, Tifa memberikan dukungan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Jakarta dan LBH Pers Padang, yang bertujuan untuk menguatkan kapasitas advokat dan aparat hukum sehingga paham dan mau menggunakan UU Pers, sekaligus menangani kasus-kasus terkait pers yang ada. Jika LBH Pers Padang memusatkan perhatiannya pada wilayah Sumatera Barat, maka program LBH Pers Jakarta dilakukan di beberapa wilayah. Diharapkan dengan memperkuat kapasitas advokat akan muncul jejaring dan pelembagaan advokat peduli pers, yang kedepannya bisa membantu menangani kasus-kasus terkait dengan pers di daerah. Program ini merupakan respon dari semakin

naiknya angka kekerasan terhadap jurnalis dalam beberapa tahun terakhir.

Aliansi Jurnalis Independen Ambon (AJI Ambon) juga menggelar program penguatan serupa, sekaligus melakukan kampanye anti kekerasan terhadap jurnalis, mengingat tingginya kekerasan terhadap jurnalis di Maluku dan Indonesia timur pada umumnya. AJI Ambon juga menggelar diskusi intensif dengan aparat hukum, termasuk aparat militer yang kerap melakukan tindak kekerasan terhadap jurnalis di Maluku. Sambutannya cukup positif, dimana KODAM serta kepolisian setempat bahkan berjanji memproses secara hukum jika ada anggotanya yang melakukan tindak kekerasan terhadap jurnalis.

“Dampak kegiatan AJI Ambon terhadap masyarakat Maluku sangat strategis dalam mewujudkan demokratisasi. Saya juga baru tahu kalau UU Pers ternyata bukan saja melindungi pers, tapi juga melindungi kepentingan publik, terutama mereka yang menjadi narasumber sebuah berita juga dilindungi hak-haknya. Bila ada masyarakat yang dirugikan karena berita sepihak, maka dia dapat menggunakan haknya itu, apakah Hak Jawab, Hak Koreksi atau mengadukan berita media tersebut ke Dewan Pers.”

(Lynda Holle, Staf Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Maluku, Perwakilan Maluku)

Untuk mempromosikan dan mengkampanyekan kebebasan media di daerah Maluku, AJI Ambon dengan dukungan dana dari Yayasan Tifa melakukan kegiatan peningkatan pemahaman hukum media serta perlindungan kebebasan pers dan kampanye publik anti kriminalisasi pers. Kegiatan ini melibatkan sejumlah stakeholder, diantaranya kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), hakim pengadilan hingga advokat dan pers.

Profesionalisme Media untuk Menjamin Kebebasan Arus Informasi

Untuk prioritas program kedua, Tifa mendukung sembilan inisiatif di berbagai daerah untuk mendorong profesionalisme media.

“Dalam strategi Tifa, profesionalisme media ini dicapai melalui,

- 1) advokasi tentang kepemilikan media,**
- 2) penerapan standar kompetensi jurnalistik**
- 3) peningkatan kapasitas jurnalis,**
- 4) pemantauan media oleh masyarakat sipil.”**

Di tahun 2012, Tifa mendukung Koalisi Indonesia untuk Demokrasi Penyiaran (KIDP) yang melakukan advokasi untuk demokrasi penyiaran di Indonesia.

Berangkat dari keprihatinan akan munculnya trend oligopoli media, program ini bermaksud mendorong keragaman kepemilikan (diversity of ownership) dan keragaman isi siaran (diversity of content). Untuk itu, KIDP kemudian mendorong adanya kebijakan yang pro-demokrasi penyiaran, dan melakukan tekanan publik yang intensif. Dalam dukungan terhadap KIDP ini, Tifa juga mendukung Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) Yogyakarta untuk melakukan advokasi berbasis riset terkait dengan digitalisasi televisi. Dalam kacamata Tifa dan PR2Media, tanpa ada regulasi yang kuat, digitalisasi televisi berpotensi melanggengkan iklim penyiaran di Indonesia yang sudah tidak demokratis. Riset yang kemudian menghasilkan sebuah buku dan policy paper bertajuk “Digitalisasi Televisi di Indonesia” diharapkan bisa menjadi rujukan dalam melakukan pengaturan terhadap kebijakan digitalisasi, sehingga negara semakin demokratis.

Di Makassar, Tifa mendukung AJI Makassar untuk melakukan peningkatan kapasitas jurnalis, dan *capacity building* jurnalis untuk meningkatkan kualitas produk jurnalis dan mengurangi potensi sengketa pers. Masih dalam rangka mendorong profesionalisme media, kali ini dukungan Tifa tidak dialamatkan

bagi jurnalis, namun bagi pengelola media supaya lebih profesional dan akuntabel dalam mengelola dana publik yang kerap digalang melalui media massa melalui Penerapan Etika Filantropi Media, bekerjasama dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI). Program ini menghasilkan dokumen Kode Etik Filantropi Media yang disahkan Dewan Pers.

Sementara itu, Tifa juga mendukung pendidikan melek media di berbagai daerah. Berbeda dengan literasi media (media literacy) yang dikenal secara umum, pendidikan melek media yang didorong Tifa adalah pendidikan yang dikombinasikan dengan pemberdayaan warga, sehingga warga mampu secara pro-aktif mengawasi media.

Di Medan, Tifa bekerjasama dengan Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) mendukung upaya pendidikan melek media televisi untuk guru SMU. Bersama Centre for Learning and Advancing Experimental Democracy (Centre for LEAD) Yogyakarta, Tifa mendukung upaya literasi media di pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu, Lembaga Studi Pers & Informasi (LeSPI) mengembangkan jejaring komunitas pemantau siaran TV di Semarang, Jawa Tengah dan beberapa kota di sekitarnya. Remotivi di Jakarta

melakukan pendidikan melekat televisi dan mendorong pengawasan publik terhadap media televisi di Jakarta dengan strategi utama advokasi dan pembentukan komunitas melalui social media.

Mengingat dukungan Tifa untuk literasi media sudah berlangsung selama lebih

dari tiga tahun, Tifa merasa perlu untuk melakukan evaluasi dan menarik pembelajaran terhadap dukungan yang telah diberikan selama ini. Tifa kemudian menggandeng Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP), yang melakukan evaluasi terhadap program Tifa dilapangan sekaligus memetakan model-model gerakan literasi media di

Indonesia. Pembelajaran yang kemudian tidak hanya diambil dari mitra Tifa, tapi juga dari mitra lainnya, kemudian didokumentasikan dalam buku bertajuk "Model-Model Gerakan Literasi Media & Pemantauan Media di Indonesia."

"Ketika media menerima sumbangan publik, maka saat itu pula dia punya kewajiban untuk transparan dan akuntabel terhadap sumbangan yang dikelola. Kode etik ini bisa menjadi panduan bagi media dalam menjalankan praktek akuntabilitas dalam pengelolaan sumbangan."

(Prof. Dr. Bagir Manan, ketua Dewan Pers)

Inisiatif PFI dan PIRAC membuat kode etik pengelolaan sumbangan media massa bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan meningkatkan akuntabilitas media sebagai pengelola sumbangan. Perumusan kode etik melibatkan media sebagai tim perumus sehingga aturan ini benar-benar dibuat oleh dan untuk media.

Tim perumus Kode Etik Filantropi Media Massa melakukan sosialisasi di berbagai kota di Indonesia. Dokumentasi: Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI)



Pertunjukan Sangkar Madu karya Teater Garasi di Erasmus Huis, Jakarta. Foto oleh Hafitz Maulana. Dokumentasi: Teater Garasi



Dukungan Media untuk Isu Strategis

Mengingat media, juga menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan gagasan, Tifa juga mendukung upaya – upaya pemanfaatan media untuk isu-isu strategis. Di tahun 2012 silam, Tifa memberi dukungan kepada lima mitra yang menggunakan beragam media. Untuk mendukung Media dan Pilkada Bersih di Jakarta, Tifa mendukung Aliansi Jurnalis Independen Jakarta (AJI Jakarta), yang berupaya meningkatkan jumlah pemberitaan yang berkualitas melalui program peningkatan kapasitas jurnalis dalam meliput isu Pilkada DKI Jakarta. AJI Jakarta juga berupaya

untuk membangun independensi media dalam pemberitaan Pilkada DKI Jakarta.

Tifa kemudian mendanai riset bersama Ruangrupa untuk melihat pemenuhan hak warga atas ruang publik di Jakarta di tengah dominasi iklan ruang luar. Sementara itu, guna mendukung isu toleransi dan keberagaman, Tifa mendukung Rumah Film, yang melakukan penelitian film bertema Islam di Indonesia, dan Yayasan Bingkai yang melakukan riset, penulisan skenario dan novel film berjudul “Cinta tapi Beda.” Tifa juga mendukung

ladang Media memproduksi video advokasi mengenai isu-isu akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, dengan mengambil kasus-kasus yang dikerjakan mitra Tifa di Serang (Front Kebangkitan Petani dan Nelayan Serang), Jepara (LBH Semarang) dan Lampung (KoAK).

Tifa juga mendukung Yayasan Teater Garasi yang melakukan produksi dan pertunjukan seni teater bertema Buruh Migran. Pementasan teater yang diberi tajuk Sangkar Madu ini dipentaskan di Jakarta dan Yogyakarta.

“Kasus demi kasus kekerasan terhadap buruh migran terlanjur menjadi “kabar rutin” yang sayangnya malah memajalkan kepekaan. Warna lain dari isu buruh migran justru harus dihadirkan untuk mengasah lagi kepedulian kelompok yang tak tersentuh “bahasa advokasi” buruh migran. Sangkar Madu mencoba dan berani menghadirkannya.”

(Harian KOMPAS, 9 Juni 2013)

Melalui teater dokumenter tentang buruh migran yang berjudul “Sangkar Madu,” Teater Garasi berusaha mengangkat sisi lain kehidupan buruh migran yang sering terlupakan, yaitu kehidupan sosial setelah pulang kembali ke Indonesia dan kegiatan keseharian mereka. Teater bergaya dokumenter ini bermodel verbatim, dimana seluruh dialog merupakan kutipan dari hasil wawancara dengan warga Desa Jangkar, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penggunaan Hak Memperoleh Informasi dalam Advokasi Publik

Jaminan hukum dalam UU No.14 tahun 2008 tentang warga Negara memiliki hak untuk memperoleh informasi tidak serta merta meningkatkan penggunaan hak tersebut. Masyarakat masih banyak yang tidak tahu bagaimana menggunakan haknya untuk memperoleh informasi yang relevan untuk pemenuhan hak-hak dasar mereka dan kepentingan publik yang strategis. Kemampuan menggunakan hak atas informasi, dianggap oleh Tifa sebagai salah satu cara untuk mendorong adanya perubahan kebijakan publik untuk pemenuhan hak-hak dasar dan kepentingan publik yang strategis.

Di sisi lain, dari sejak UU ini belum disahkan, selalu dibayang-bayangi oleh UU Rahasia Negara atau hukum yang mengatur bahwa hak atas informasi dapat dibatasi atas nama keamanan nasional. Permasalahannya adalah ruang lingkup apa yang dianggap dalam kategori rahasia negara karena dipandang mengganggu keamanan nasional tidak selalu sesuai dengan apa yang secara ketat dan sah dapat dibatasi dalam perlindungan hak asasi manusia dan rezim demokrasi. Tifa melihat upaya mengawal proses legislasi yang mengancam jaminan

hukum hak atas informasi sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan hak-hak sipil politik yang penting untuk warga negara terhindar dari kriminalisasi yang berlebihan atas nama keamanan nasional dan mencegah praktek pemerintahan yang buruk dengan merahasiakan informasi yang tidak ada kaitannya dengan keamanan nasional.

Di tahun 2012 ini dukungan Tifa diarahkan untuk memperkuat kemampuan komunitas dan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mengadvokasikan hak dasar dan kepentingan publik yang dianggap strategis melalui penggunaan hak untuk mengakses informasi untuk pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas lingkungan, pemilihan kepala daerah dengan informasi yang memadai dapat memberikan pilihan rasional, akses pada keadilan, serta terlibat secara kritis dalam inisiatif global untuk mendorong pemerintahan terbuka (Open Government Partnership) dalam kerangka memajukan implementasi UU KIP di badan publik. Tifa juga mendukung upaya peningkatan kapasitas koalisi OMS dalam mempengaruhi perbaikan regulasi yang berpotensi membahayakan jaminan hak atas informasi di Indonesia.

Inisiatif Tifa untuk memperkuat

kemampuan komunitas dan organisasi masyarakat sipil antara lain: pengembangan klinik dan pengajaran keterbukaan informasi publik di kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Program ini tidak hanya memperkuat kurikulum dan pengajaran, namun juga menempatkan klinik KIP sebagai penyedia layanan informasi dan penanganan kasus terkait informasi untuk warga. Bersama Indonesia Budget Center (IBC) Tifa juga mendorong penguatan warga untuk meminta informasi terkait anggaran, terutama penggunaan dana bantuan sosial, yang sering dimanfaatkan *incumbent* dalam pemilihan kepala daerah. Kali ini, program berfokus pada Pemilukada Jakarta.

Tifa mulai mendorong advokasi dan pemanfaatan informasi yang didapat melalui penggunaan hak atas informasi kesehatan oleh komunitas korban lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, dengan mitranya Media Lintas Komunitas (Media Link). Tifa juga terlibat dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mendorong hak akses informasi, hak akses partisipasi dan hak akses keadilan dalam penataan ruang di Jawa Tengah. Dan juga bagaimana masyarakat adat di 3 kabupaten di Kalimantan Barat dapat menggunakan dan memanfaatkan hak atas informasi dan pendampingan hukum baik hukum adat dan hukum



formal guna memperoleh akses pada keadilan. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Lembaga Bela Banua Talino (LBBT).

Hak atas informasi publik juga menjadi titik masuk dan bekal dalam advokasi perbaikan tata kelola penyelenggara penempatan, pengawasan dan penanganan Buruh Migran Indonesia (BMI) yang dijalankan oleh Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama dan Kebudayaan (INFEST), baik yang di kantong buruh migran di Jawa maupun organisasi dan anggota serikat buruh migran di Hong Kong. Dengan memperkuat kapasitas beberapa kelompok pemerhati buruh migran di Indonesia, dan juga serikat pekerja migran Indonesia di Hong Kong, upaya permintaan informasi kemudian berlanjut menjadi advokasi perbaikan kebijakan, termasuk keluarnya surat edaran dari imigrasi Yogyakarta yang membolehkan BMI pergi ke luar negeri tanpa Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), dan membantu upaya judicial review atas KTKLN.

Tifa bersama dengan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya juga berupaya memperkuat kapasitas kelompok masyarakat sipil dalam menggunakan hak atas informasi untuk memperoleh hak atas keadilan dalam kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Jawa Timur.

Sementara itu, wali murid merasa sangat berdaya dengan hak atas informasi, sehingga dapat melakukan pemantauan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Bandar Lampung untuk kepentingan pendidikan anak-anak mereka. Program ini dijalankan oleh Komite Anti Korupsi (KoAK) Lampung. Kampanye dan pemahaman atas implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik secara luas juga menjadi perhatian Tifa dan Indonesian Parliamentary Center (IPC). Tifa dan IPC mengembangkan sebuah website <http://kebebasaninformasi.org/>, website ini menyediakan informasi tentang inisiatif masyarakat sipil dalam meminta dan memanfaatkan informasi,

sekaligus memberi informasi terkini seputar hak atas informasi.

Satu website lagi yang dikembangkan Tifa bersama dengan mitranya, Perkumpulan Air Putih, adalah uji coba www.aksesinfopolisi.org. Tujuannya, agar warga bisa mudah dan tidak takut meminta informasi kepada kepolisian, dimana informasi tersebut akan diteruskan secara otomatis menggunakan teknologi informasi. Situs ini dikembangkan menggunakan basis program alavatei yang dikembangkan Open Society Foundations (OSF) melalui kelompok aktivis teknologi informasi di Inggris yaitu MySociety. Program ini sudah dikembangkan di lima benua dan delapan negara atau yuridiksi hukum (regional Eropa). Program ini di Indonesia masih inisiasi sifatnya karena terhambat oleh pemahaman Polisi bahwa permintaan elektronik tidak dapat diteruskan. Pengembangan selanjutnya di Indonesia oleh Tifa diubah konsepnya dengan mengikutsertakan badan publik lainnya seperti konsep aslinya di Inggris dan bagaimana sistem ini tidak

hanya meneruskan tetapi juga dapat dikembangkan dalam sistem internal badan publik untuk mengurangi resistensi.

Dua dukungan terhadap upaya advokasi atas RUU yang dianggap mengancam hak publik atas informasi

yaitu kerjasama dengan Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) melakukan revisi RUU Rahasia Informasi Strategis Keamanan Nasional dari organisasi masyarakat sipil sebagai draft alternatif RUU Rahasia Negara dari pemerintah untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

IDSPS bersama IMPARSIAL melakukan advokasi yang berhasil menunda pembahasan RUU Keamanan Nasional inisiatif pemerintah yang beberapa pasal-pasal tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.

“Di Jawa Tengah sudah lumayan maju, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota maupun propinsi kebanyakan mempunyai web atau akses terhadap internet sehingga informasi bisa disampaikan melalui web ke masyarakat. Selain itu, ketika kemudian ada proses pembangunan atau lainnya berkaitan dengan kesimpangsiuran informasi di masyarakat, bisa diberikan misalnya di balai desa atau kelurahan agar bisa mudah dijangkau masyarakat.”

(Andiyono, Direktur Eksekutif, LBH Semarang)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang menggunakan akses informasi sebagai upaya untuk memperoleh data untuk kegiatan advokasi. Selama ini, seluruh advokasi yang dilakukan oleh LBH kebanyakan menggunakan akses informasi untuk mendapatkan datanya.



PROGRAM HAK ASASI MANUSIA DAN KEADILAN

Program Hak Asasi Manusia dan Keadilan, memiliki 4 core program:
1) Akses Terhadap Keadilan, 2) Keadilan Transisional,
3) Kewarganegaraan dan Kesetaraan, dan 4) Promosi Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya.

Akses Terhadap Keadilan

Pada tahun 2012, Tifa mendukung lima inisiatif untuk mendukung akses pada keadilan (access to justice) di Indonesia. Melanjutkan advokasi UU Bantuan Hukum, yang berhasil mensahkan UU Bantuan Hukum di tahun 2011, Tifa mendukung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta untuk melakukan pemantauan dan harmonisasi implementasi UU Bantuan Hukum dalam mendorong Perda bantuan hukum. Perda ini akan menjadi rujukan teknis bagi pemerintah daerah

yang melaksanakan UU Bantuan Hukum di wilayahnya masing-masing. Di Makassar, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar melakukan penguatan dan pengembangan program bantuan hukum gratis yang dicanangkan Pemerintah Kota Makassar.

Sejalan dengan penguatan regulasi dan penguatan pemerintah daerah, Tifa juga mendukung penguatan paralegal dan penanganan kasus oleh lembaga bantuan hukum di

beberapa wilayah. Di Sumatera Barat dan Yogyakarta, Tifa mendukung LBH Padang dan LBH Yogyakarta mengembangkan sekolah paralegal. Pendidikan paralegal yang sistematis semacam ini masih terbilang baru dan menjadi *pilot project* Tifa di tahun 2012 ini. Sementara itu, Tifa mendukung LBH Sulawesi Tengah untuk memperkuat paralegal dan memperluas layanan pendampingan kasus di Sulawesi Tengah, khususnya bagi petani dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik

sumberdaya alam. Dukungan serupa juga diberikan kepada LBH Makassar yang mendorong penguatan dan pengembangan program

Di Bandung, sebagai lanjutan dukungan kepada pengembangan klinik hukum di universitas, Tifa mendukung PKH (Pendidikan Hukum Klinis) Universitas Pasundan dalam mengembangkan *street law* sebagai salah satu bentuk klinik hukum yang dikembangkan di Universitas Pasundan. Dalam program

ini, mahasiswa diterjunkan ke berbagai tempat, utamanya LP khusus anak, untuk memberikan penyuluhan hukum, terutama terkait dengan hak-hak tersangka dan terpidana.

Dalam upaya mendorong tercapainya akses terhadap keadilan, Tifa bersama mitranya OSJI melalui Legal Empowerment Program (LEP), berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Sejak akhir 2010, Tifa mengelola program beasiswa OSF untuk meraih gelar S2 di Universitas

Nottingham dan Universitas Durham. Setiap tahunnya, OSF mengadakan pertemuan bagi para pengelola program beasiswa untuk saling bertukar pengalaman, berbagi informasi dan perencanaan pengelolaan beasiswa. Di tahun 2012, OSF menggelar Scholarship Coordinator Meeting di Batumi, Georgia, dimana Tifa terlibat untuk turut serta merencanakan pengelolaan beasiswa. Penerima beasiswa OSF melalui Tifa pada 2012 berjumlah lima orang.

“Saya ikut pendidikan ini agar bisa membantu diri sendiri dan masyarakat miskin ketika berhadapan dengan kasus hukum.”

(Afrilni, warga Jorong Lambah, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)

Lembaga Pendidikan Paralegal (LPP) yang dikelola LBH Padang merupakan pendidikan paralegal pertama di Indonesia sebagai wujud implementasi Undang-Undang No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum. LPP didirikan pada bulan Desember tahun 2012. Warga seperti Afrilni termotivasi mengikuti pendidikan itu karena pengalaman pribadinya menghadapi berbagai kasus hukum, seperti peristiwa penahanan seorang kakaknya karena dituduh mengambil sapi milik kelompok tani. Inisiatif ini merupakan pengembangan model bantuan hukum komunitas. Paralegal adalah anggota masyarakat yang dididik dengan pengetahuan hukum dasar sehingga mampu menyelesaikan persoalan hukum di tengah masyarakat.

Acara pembukaan dan peresmian Lembaga Pendidikan Paralegal (LPP) Padang.
Dokumentasi: LBH Padang





“Sungguh senang bekerja untuk pengungkapan kebenaran dalam momen Tahun Kebenaran. Melalui Dengar Kesaksian korban pelanggaran HAM di Solo, generasi muda seperti mahasiswa menyatakan tertarik mengetahui kebenaran tentang peristiwa '65 yang disebut PKI. Simpati mereka diwujudkan dalam keterlibatan dalam kepanitiaan dan diskusi yang cukup intens sebelum dan sesudah Dengar Kesaksian.”

(Didik Dyah Rahayu, Sekber 65 Solo, Anggota KKPK)

Program ini merupakan program koalisi masyarakat sipil yang pada tahun 2012 menyelenggarakan inisiatif untuk tahun kebenaran dengan tujuan mendorong adanya kebijakan dan program pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran HAM di masa lalu. Selain menjadi contoh dan desakan bagi pemerintah, inisiatif tahun kebenaran ini diharapkan bisa membawa kembali harapan bagi komunitas korban dan para pendampingnya untuk terus mengejar pemenuhan hak-hak korban. Salah satu kegiatan utama adalah diadakannya sesi Dengar Kesaksian (public hearing).

Keadilan Transisional

Guna memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, Tifa mendukung Koalisi Keadilan & Pengungkapan Kebenaran (KKPK) untuk melakukan kampanye melawan lupa terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menyasar kelompok muda, kampanye ini diharapkan bisa memberikan alternatif sumber atas sejarah yang terjadi di Indonesia.

Anak muda juga menjadi sasaran dari Human Rights School for Students (SEHAMA) 2012 yang diselenggarakan oleh KONTRAS dengan dukungan Tifa. Pendidikan ini diharapkan bisa menghasilkan anak-anak muda yang tidak hanya paham namun juga berkomitmen untuk melakukan tindakan dan menggagas inisiatif baru untuk perjuangan HAM di Indonesia.

Tifa juga mendukung Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) melanjutkan proses Dialog Jakarta-Papua yang sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini, untuk mendorong terwujudnya Papua damai di Indonesia.



Kewarganegaraan dan Kesetaraan

Dalam core program ini, Tifa melihat tantangan keberagaman dan pemenuhan hak warga negara di Indonesia ada pada lemahnya legislasi, sistem ganti rugi (kompensasi), dan mekanisme sosial. Core program ini bertujuan untuk mendorong perbaikan dalam pengelolaan keberagaman di pemerintahan dan meningkatnya komitmen warga terhadap prinsip-prinsip non diskriminatif dan nir-kekerasan.

Untuk tujuan ini, Tifa kemudian memberikan dukungan kepada 12 mitra yang bekerja di tingkat nasional maupun daerah. Bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Tifa mendukung upaya advokasi Rancangan Undang-Undang Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan. Sementara itu Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPOTODA) melakukan rekonstruksi

dan monitoring peraturan perundang undangan dalam perizinan pendirian tempat ibadah (studi pemetaan kebijakan dan perizinan di wilayah Jawa Timur, NTT, Bali, dan Jawa Barat).

Melanjutkan dukungan untuk Pancasila Project yang bertujuan mendorong komitmen warga terhadap prinsip-prinsip non diskriminatif dan nir-kekerasan yang menjadi nilai-nilai dasar Pancasila, Tifa mendukung lima inisiatif yang bertujuan merevitalisasi Pancasila dengan berbagai cara. Lembaga Analisis Informasi (ESSAI) menggelar pentas teater rakyat: Membaca Kembali Pancasila.

Sementara itu Pusat Studi Kebijakan Pendidikan - IAIN Surakarta mengembangkan model pendidikan Pancasila sesuai dengan semangat kurikulum tingkat satuan di madrasah ibtidaiyah se-Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengembangkan

pembudayaan pendidikan karakter bangsa melalui training kebangsaan. Institut Toleransi Keberagaman dan Pelestarian Lingkungan (ILALANG) mendorong revitalisasi Pancasila di kalangan mahasiswa sebagai upaya mewujudkan visi Papua Tanah Damai, di Papua. Sementara itu Epistema Institute berupaya membangun arsitektur negara hukum Indonesia yang berkeadilan eko-sosial melalui pengarusutamaan multikulturalisme di Sekolah Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).

Membidik anak muda, Tifa juga mendukung inisiatif untuk mengembangkan pendidikan multikultural di sekolah, diantaranya bekerjasama dengan Lembaga Studi Islam dan Politik (LSIP) di Yogyakarta dan Magelang, serta, LSAF, di Jawa Barat. Tifa juga mendukung Center for Research on Inter group Relations and Conflict Resolution (CERIC) yang melakukan riset aksi atas konflik yang terjadi di sekolah di Jakarta.

“Cara mengajarkan ide atau gagasan Pancasila harus melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat dan diberi porsi yang setara untuk saling mengisi terhadap Pancasila. Negara menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk proses sosialisasi. Negara juga melakukan regulating; melakukan pengaturan-pengaturan prinsip-prinsip dasar bagaimana supaya dalam sosialisasi Pancasila tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri.”

(Yudi Latief, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila dan penulis buku Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas)

Epistema Institute menggelar Seri Lokakarya Pancasila, Pendidikan Karakter dan Pendidikan Tinggi Hukum bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dengan staf khusus Menteri bidang evaluasi pendidikan yang mempunyai program pengkajian pelaksanaan pendidikan karakter. Selama ini, hal yang dirasakan adalah miskinnya pendidikan karakter yang terinternalisasi dalam pengajaran di fakultas-fakultas hukum. Tantangannya adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila, khususnya toleransi dan demokrasi substantif, agar dapat dijadikan acuan.



FGD Pancasila di Pontianak.
Dokumentasi: Epistema Institute



Siswa-siswi SMAN 3 Yogyakarta menanam padi dan memanen ketela di Desa Blembem, Kidul, Sleman.

Dokumentasi oleh CEES.

Promosi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pada tahun 2012, core program promosi hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) difokuskan kepada upaya penguatan hak atas pangan. Hak atas pangan yang didukung Tifa sampai saat ini baru sampai pada tahap kedaulatan pangan dan advokasi agraria sebagai prasyarat dari tercapainya kedaulatan pangan.

Tifa mendukung advokasi kebijakan tindak lanjut putusan judicial review Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang dilaksanakan oleh Eksekutif Nasional Walhi. Sementara itu Tifa juga mendukung upaya judicial review yang dilakukan Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA) atas Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Undang-undang ini berpotensi melegalisasi perampasan tanah oleh negara yang

juga akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, baik hak-hak sipil-politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) warga negara.

Sementara itu, di beberapa wilayah Tifa mendukung upaya kedaulatan dan diversifikasi pangan di daerah. Tifa mendukung Center for Extension and Empowerment Studies (CEES) yang mengampanyekan gagasan diversifikasi konsumsi pangan di kalangan masyarakat urban di Yogyakarta. Program ini juga mendorong keterlibatan pemerintah dan perguruan tinggi dalam kampanye diversifikasi konsumsi pangan di Yogyakarta.

Serupa dengan inisiatif yang dilakukan CEES, Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) melakukan kampanye di Flores Timur. Selain mengkampanyekan pangan lokal melalui berbagai festival pangan dan juga pengembangan kantin pangan lokal di sekolah-sekolah,

YPPS melakukan advokasi Perda Pangan Lokal sekaligus melakukan review atas program-program bantuan pangan pemerintah, termasuk program pemerintah nasional: beras untuk rumah tangga miskin (Raskin).

Di Kalimantan Barat, Pontianak Institute mendorong pemerintah melakukan upaya perlindungan terhadap mekanisme produksi pangan tradisional oleh masyarakat adat dan masyarakat di Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Sementara itu di Papua Barat, PERDU, selain melakukan kampanye untuk menyelamatkan sagu dan umbi-umbian sebagai pangan lokal, juga mendorong kebijakan daerah yang melindungi pengembangan sagu dan umbi-umbian sebagai pangan lokal.

“Program inisiasi pangan lokal yang tidak hanya pemberdayaan produsen tetapi konsumen, dalam hal ini masyarakat perkotaan, di Jogja adalah hal yang baru. Kami sebagai produsen jadi mengenal konsumen kami lebih dekat. Sehingga yang kami produksi sesuai kemauan konsumen meski berbahan produk ketela dan lain-lain. Saya harap program ini terus jalan.”

(Ibu Eni, produsen Choco Wijen, Yogyakarta)



Produk pangan lokal selama ini hanya merupakan makanan yang dianggap ‘rendahan’ bagi khalayak umum. Kurangnya kreativitas produk pangan lokal ini mulai dari aspek pengemasan, cara penyajian, variasi rasa, kebersihan, standarisasi produk dan sebagainya. Oleh karena itu CEES melalui program **Pendampingan Kemasan dan Label Produk Pangan Lokal** melakukan pemberdayaan terhadap produsen-produsen untuk menciptakan produk pangan lokal dengan kemasan dan label yang lebih menarik. Setiap kemasan produk juga ditampilkan tag line “Small Step for Food Sovereignty,” yang diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk pangan lokal.



PROGRAM PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN INDONESIA

Kualitas demokrasi akan meningkat apabila pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) dan sipil dan politik (sipol) yang non diskriminatif dan imparsiial dapat diterapkan pada semua warganegara, khususnya bagi kaum marginal, termasuk bagi buruh migran.

Data BNP2TKI mencatat bahwa setiap tahun terdapat lebih dari 650.000 buruh migran Indonesia meninggalkan tanah air untuk mencari pekerjaan di luar negeri dengan tujuan negara Timur Tengah dan Asia, khususnya ke Malaysia dan Saudi Arabia. Saat ini, ada sekitar 4.3 juta buruh migran Indonesia sedang bekerja di luar negeri dengan kontribusi remitansi sebesar US\$ 6 milyar pada tahun 2011¹. Diperkirakan jumlah buruh migran yang tidak berdokumen mencapai 2-4 kali lebih tinggi. Dari data buruh migran tersebut, kira-kira 75 persen adalah perempuan yang khususnya bekerja di sektor domestik.

Walaupun buruh migran memberikan kontribusi penting terhadap

pembangunan ekonomi lokal, namun perhatian terhadap perbaikan perlindungan di dalam negeri maupun di luar negeri masih belum memadai. Akibatnya, kerentanan dan resiko dalam setiap siklus migrasi semakin tinggi karena lemahnya peran pemerintah.

Program buruh migran Yayasan Tifa berkonsentrasi untuk membangun migrasi yang aman bagi buruh migran Indonesia. Upaya ini dilakukan di tingkat nasional dan tingkat lokal dengan berbagai mitra Tifa, melalui tiga pendekatan berbasis hak dan menggunakan berbagai metode advokasi. Strategi program ini melalui kolaborasi Yayasan Tifa dan BNP2TKI, melalui proyek Poverty Reduction through Safety in Migration: A Pilot Initiative

yang didanai oleh Ausaid dengan wilayah kerja yang mencakup Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan The Empowerment of Women Migrant Workers and Their Families in the Place of Origin melalui pendanaan JSDF World Bank dengan wilayah kerja di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seluruh aktifitas implementasi program baik di nasional maupun daerah dilakukan bersama-sama dengan melibatkan stakeholder terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Program Buruh Migran Yayasan Tifa secara khusus bertujuan untuk mempromosikan migrasi aman melalui komponen kegiatan Access to Justice, Access to Finance dan Access to

Information. Seluruh komponen kegiatan ini berbasis komunitas dimana seluruh lapisan masyarakat dapat mengambil peran dalam memberikan informasi mengenai migrasi aman dan pengelolaan remitansi yang produktif.

a. Access to Justice (Akses Terhadap Keadilan)

Komponen utama dari kegiatan access to justice meliputi pembentukan community-based organization (CBO) atau organisasi berbasis masyarakat di wilayah program yang beranggotakan keluarga buruh migran dan sukarelawan. Yayasan Tifa, saat ini telah menginisiasi pembentukan 87 CBO di Jawa, 20 CBO di NTB dan 30 CBO di NTT. Aktifitas utama dari CBO ini melakukan pendidikan migrasi aman dan hak-hak buruh migran bagi warga di daerah asal dan menjadi mitra kritis pemerintah baik di desa maupun di level yang lebih tinggi dalam membangun mekanisme perlindungan BMI di daerah asal.

Kemudian Tifa juga menginisiasi pelatihan paralegal bagi komunitas buruh migran yang berfungsi menyediakan konsultasi hukum dan penanganan kasus migrasi di tingkat lokal. Tugas utama paralegal adalah memberikan informasi mengenai proses keamanan migrasi dan menyediakan dukungan garda depan perlindungan TKI di desa. Pelatihan paralegal sudah dilakukan di NTT, NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saat ini sudah terdapat 188 paralegal yang tersebar di semua wilayah tersebut, dan sudah berhasil menangani 34 kasus di Indramayu, 32 kasus di Cilacap, 16 kasus di Banyuwangi. Sementara di NTT dan NTB, mitra Yayasan Tifa telah mencatat total 52 kasus yang saat ini sedang ditangani.

Untuk memberikan kajian terhadap kinerja PPTKIS, Yayasan Tifa juga menginisiasi pembuatan web based report card dengan tujuan utama, buruh migran sebagai konsumen dapat memberikan pendapat terhadap PPTKIS

yang telah memberangkatkannya. Hasil kajian kinerja PPTKIS ini diharapkan pula menjadi bahan analisa dari pengambil kebijakan dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap buruh migran.

Tifa juga mengadvokasi kebijakan di tingkat nasional dilakukan melalui advokasi Revisi UU 39/2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri bekerjasama dengan Jaringan Advokasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (JARI PPTKILN). Sementara itu, Perkumpulan Peduli Buruh Migran, juga melakukan advokasi kebijakan terhadap hak atas kesehatan dan klaim asuransi buruh migran. Tifa juga membangun terobosan dengan menginisiasi pembuatan prosedur standar (SOP) penanganan kasus secara bersama dengan pemangku kepentingan di kabupaten dan propinsi terutama dengan Disnaker dan BP3TKI. SOP penanganan kasus ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dari SOP yang telah ada di Kemenakertrans dan BNP2TKI.

Di tingkat lokal, Tifa mendukung Perkumpulan Panca Karsa, yang berupaya membangun kapasitas kelembagaan KPTKI (Komite Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). KPTKI Lombok Barat, adalah satu diantara dua KPTKI di Nusa Tenggara Barat (NTB). KPTKI di Lombok Barat ini berdiri setelah dimandatkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Buruh Migran di Lombok Barat. Tifa juga melakukan advokasi Raperda Perlindungan TKI di Cilacap, Indramayu, Banyuwangi, serta peraturan desa di berbagai wilayah program. Saat ini Peraturan Daerah Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Belu dan Kabupaten Flores Timur telah disahkan oleh DPRD setempat.

Perlindungan di negara penempatan juga menjadi perhatian Tifa. Setelah melakukan *assessment* model perlindungan dan modus migrasi TKI di Sabah, Tifa memulai inisiasi pembentukan paralegal di Sabah bekerjasama dengan Konsulat Republik Indonesia di Sabah. TOT paralegal terhadap 30 orang sudah dilakukan. Mereka adalah WNI yang tinggal di Sabah dari perwakilan buruh migran, guru sekolah anak TKI dan paguyuban suku asal Indonesia.

“Seorang sponsor buruh migran bernama “Bud” mendapat hukuman penjara 3,6 tahun ditambah denda Rp 120 juta subsider tiga bulan kurungan atas tuntutan tindak pidana perdagangan orang yang dilayangkan oleh Paralegal di Banyuwangi. Paralegal ini bekerjasama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Banyuwangi melaporkan kasus yang dialami Aan Wahyudi bin Mawardi, seorang mantan buruh migran, ke Polres Banyuwangi. Enam bulan kemudian Pengadilan Negeri Banyuwangi memvonis Bud bersalah. Korban, Aan, baru berumur enam belas tahun ketika menjadi buruh migran di perusahaan kayu lapis di Malaysia. Bud bersama rekannya Ton memalsukan identitas Aan agar bisa berangkat dan bekerja di negeri jiran tersebut.

Keberhasilan ini sangat berarti bagi masyarakat Banyuwangi khususnya bagi paralegal karena jarang ada kasus yang menimpa buruh migran dapat diproses hingga pengadilan dan menang, apalagi dengan menggunakan UU No.21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

b. Access to Finance (Akses Terhadap Keuangan)

Pengelolaan remitansi merupakan hal yang cukup menantang bagi banyak keluarga buruh migran. Hasil riset mengkonfirmasi bahwa hasil remitansi lebih banyak digunakan untuk hal yang konsumtif.

Namun banyak pula contoh kasus migrasi berulang akibat jeratan hutang karena biaya migrasi yang tinggi dan penetapan tujuan migrasi yang tidak terencana.

Yayasan Tifa melalui komponen akses terhadap keuangan bertujuan untuk memperkuat kapasitas buruh migran dan keluarganya untuk mengelola remitansi secara baik dan benar.

Serangkaian pelatihan pengelolaan keuangan dan asistensi pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan materi utama diskusi keluarga untuk menetapkan rencana migrasi, sumber biaya migrasi dan alternatif usaha.

Saat ini ada 79 parafinance di NTT dan NTB, dan 54 pelatih kewirausahaan. Pelatihan pengelolaan keuangan telah menjangkau 2498 keluarga buruh migran dengan komposisi 876 laki-laki dan 1622 perempuan di NTT dan NTB.

Selain pelatihan secara langsung, berbagai medium komunikasi seperti kalender, buku saku dan radio broadcasting digunakan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

“Saya sekarang memiliki 12 ekor sapi dan sawah hasil saya bekerja di Arab Saudi selama 2 tahun. Saya bersyukur memiliki suami dan orang tua yang tidak semata-mata bergantung dari remitansi saya bekerja, mereka tetap bekerja seperti biasa, jadi uang saya tetap utuh.”

(Sri Hartati, mantan buruh migran asal Sumbawa sekarang menjadi parafinance di desanya Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir)

Sri adalah satu dari sedikit buruh migran yang berhasil mengelola remitansi nya dengan baik. Akhir bahagia ini dicapai hanya karena migrasi yang terencana baik melalui diskusi dan kesepakatan dengan anggota keluarga sebelum berangkat.

Setelah kembali ke kampung halaman, Sri kini menikmati jerih payahnya dan tetap tinggal dirumah sampai sekarang dengan aktifitas memelihara hewan ternak dan bersawah. Selain itu, untuk menambah penghasilannya, Sri juga membuat kerupuk yang dititipkan di toko sekitarnya.

Saat ini, Sri tergabung dalam CBO di desa Hijrah dan telah dilatih oleh Tifa melalui program Poverty Reduction through Safety in Migration sebagai salah satu parafinance.

Menurut Sri, kombinasi pengetahuan yang didapatnya dalam pelatihan serta pengalamannya sebagai TKI dan keberhasilan dalam mengelola remitansi sangat membantu dalam menyebarkan informasi tentang pengelolaan keuangan keluarga di desanya.

Orang-orang yang menerima informasi lebih percaya karena bisa melihat contoh langsung pada dirinya.

Sementara itu, inisiasi kelompok usaha bersama yang terbentuk dari proyek yang didanai World Bank dan AusAID ini sudah ada 52 kelompok simpan pinjam, 17 kelompok produksi, 13 kelompok ternak, 6 kelompok konveksi dan 2 kelompok dagang.

Akses terhadap layanan keuangan dari perbankan maupun lembaga keuangan mikro juga telah dilakukan melalui kerjasama pelatihan literasi keuangan dengan Bank Mandiri dan BNI, serta juga membangun produk-produk keuangan yang ramah bagi TKI melalui kerjasama dengan BMT Ben Sejahtera di Cilacap dan BMT Hakiki di Banyuwangi. Adapun produk-produk yang tersedia seperti pinjaman pendidikan anak, pinjaman keberangkatan, pinjaman wirausaha, tabungan, dan lain-lain.

“Tadinya kami inginnya keluar negeri. Tapi sejak ada simpan pinjam ini, kami sudah tidak pengen pergi.”

(Ibu Musilah, bendahara kelompok Rengganis)

Kelompok ini didirikan pada tanggal 14 September 2012, di Dusun Krajan, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Usaha kelompok Rengganis adalah simpan pinjam dengan jumlah anggota 17 orang dan nasabah 48 orang. Nasabahnya memiliki usaha kecil, sehingga uang pinjaman digunakan untuk modal usaha seperti dagang sayur, jual pisang goreng, warung kopi, konveksi, pertanian, toko kelontong. Keinginan kelompok ini adalah membantu lebih banyak warga masyarakat (nasabah), dan untuk menambah modal usaha. Anggotanya sendiri diwajibkan untuk menabung.



Seorang warga Atambua, Kabupaten Belu, NTT, menyetorkan uang tabungannya di Credit Union Kasih Sejahtera.

Foto oleh Khres Senduk, Yayasan Tifa.

c. Access to Information (Akses Terhadap Informasi)

Sudah menjadi rahasia umum bahwa 80 persen informasi mengenai migrasi diperoleh calon buruh migran melalui broker atau calo. Banyak persoalan ditimbulkan akibat minimnya peran pemerintah terkait dalam menyebarkan informasi migrasi aman.

Pemutarbalikan fakta oleh calo mengenai gaji tinggi, tidak perlu menunggu lama dipenampungan, masa kontrak dan majikan baik sangat umum terjadi. Salah satu upaya Yayasan Tifa dalam membantu pemerintah adalah dengan mengembangkan Rumah Internet TKI atau Pusat Teknologi Komunitas (Community Technology Center – CTC).

CTC ini berbentuk seperti warung internet namun berfungsi untuk menyediakan informasi migrasi melalui internet, melatih TKI dan keluarganya untuk paham teknologi informasi dan komputer, menyediakan layanan komunikasi dan menjadi tempat aktifitas komunitas buruh migran yang mencari informasi mengenai isu migrasi dan PPTKIS yang berkinerja baik. Selain lewat internet, Tifa juga menyediakan berbagai informasi migrasi dalam bentuk cetak dan audio visual.

Di setiap kecamatan didirikan CTC dan salah satu yang berjalan secara efektif terjadi di Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. CTC yang terletak di desa Danasri Kidul ini menempati rumah Ibu Tun Habibah, salah seorang pengurus di wilayah Kecamatan Nusawungu.

CTC ini telah berfungsi sebagai jendela dunia bagi kelompok dampingan dan masyarakat pada umumnya. Ada yang sudah bisa chatting atau video call antara keluarga buruh migran di Indonesia dengan buruh migran yang sedang bekerja di luar negeri.

CTC yang aktif seperti ini telah benar-benar membuka akses informasi bagi masyarakat luas termasuk calon dan keluarga buruh migran sehingga buruh migran tidak lagi seperti katak dalam tempurung.

CTC berfungsi sebagai pusat informasi yaitu memperoleh berbagai informasi tentang migrasi seperti daftar alamat PPTKIS, contoh surat menyurat, juga menjadi tempat belajar bersama mengenai komputer, keuangan, sekaligus sebagai tempat pengaduan dan penanganan kasus.

Informasi lain yang juga penting dalam memastikan migrasi aman adalah data migrasi. Data migrasi tidak pernah akurat dimana bisa dibuktikan dari angka TKI yang berangkat dari pemerintah kabupaten, propinsi hingga tingkat nasional.

Untuk itu, CBO dan pemerintah desa diharapkan bisa bekerjasama untuk melakukan pendataan dan terus memperbarui data migrasi tersebut. Data ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pencegahan maupun penanganan kasus, termasuk untuk membantu pelaksanaan program-program pemberdayaan bagi TKI dan keluarganya.

Hingga saat ini, seluruh CBO sudah melakukan data migrasi walau belum mencakup seluruh desa. Namun manfaat ini sudah dirasakan.

Kelompok buruh migran Berkah Langgeng di desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, adalah salah satu kelompok yang giat melakukan update data migrasi di desanya.

Kepala desa yang baru terpilih sangat memberikan dukungan

kepada kelompok mantan buruh migran di desanya. Merasa data ini penting, Kades ini selalu berkoordinasi dengan pengurus Berkah Langgeng. Kelompok buruh migran Berkah Langgeng di desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, adalah salah satu kelompok yang giat melakukan update data migrasi di desanya.

Kepala desa yang baru terpilih sangat memberikan dukungan kepada kelompok mantan buruh migran di desanya. Merasa data migrasi ini penting, Kades ini selalu berkoordinasi dengan pengurus Berkah Langgeng.

Jika ada warganya yang akan bekerja ke luar negeri mengurus dokumen di Balai Desa, oleh kepala Desa pengurus diundang untuk ikut melakukan pendataan dan memberikan informasi migrasi yang aman.

Koordinasi yang dilakukan secara terus menerus ini menjadikan semua warga desa yang pergi ke luar negeri terdata. Kades merasa terbantu dengan adanya data migrasi yang dikumpulkan oleh kelompok Berkah Langgeng ini.

Dengan adanya data yang tersimpan di desa, perlindungan terhadap buruh migran sudah bisa mulai sejak dari awal, karena tidak ada lagi pemalsuan nama, umur, alamat dan sebagainya. Seharusnya koordinasi ini bisa ditiru di desa lainnya.

Sementara itu Usaha simpan pinjam yang dijalankan kelompok berjalan baik, dan menunjukkan perkembangan positif. Peminjam yang kebanyakan anggota kelompok sejauh ini rajin mengangsur sehingga modal usahanya semakin bertambah.

Strategi advokasi lain yang juga digunakan Tifa adalah membangun dialog dengan seluruh pemangku kepentingan dari tingkat nasional hingga kabupaten.

Dialog antar pemangku kepentingan ini menjadi wadah untuk komunikasi, bertukar pikiran, berbagi pengetahuan dan koordinasi antar CBO, pemerintah, LSM, lembaga keuangan dan mitra Yayasan Tifa. Wadah ini sudah dimulai di seluruh target di Cilacap, Banyuwangi, dan Propinsi NTB.

Dialog multi stakeholder di NTB sudah menggagas pembuatan Grand Design

untuk Perlindungan BMI dan Keluarganya di tingkat propinsi. Gagasan ini masih terus dikomunikasikan dan disusun agar menjadi konsep yang memiliki target yang terukur dan tahapan yang jelas.

Gagasan pembuatan desain besar ini ditanggapi secara positif oleh Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh dengan mengatakan Pemerintah Kota Mataram siap mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) berkualitas dan memiliki berbagai keahlian sesuai bidangnya.

Pemerintah Kota Mataram, katanya di Mataram, Jumat, mendukung "grand desain" atau desain besar

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perlindungan TKI dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menyebutkan tidak akan mengirim TKI pembantu rumah tangga (PRT) mulai tahun 2017².

Tifa juga mendorong pembentukan forum kepala desa di wilayah program untuk mendorong terbentuknya mekanisme perlindungan bagi buruh migran dan keluarganya melalui pertukaran pikiran dan berbagi informasi.



Laporan Tahunan 2012

**DAFTAR MITRA
YAYASAN TIFA 2012**

Program: Demokrasi & Tata Pemerintahan

- **Amrta Institute for Water Literacy**
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Lokal dan Pemerintahan untuk Mendorong Tumbuhnya Pengelolaan Air yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
- **Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Sumatera Utara (FITRA) Sumut**
Investigasi dan Pemanfaatan Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan Perkebunan di Labuhan Batu Utara
- **Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)**
Pemantauan Kinerja Anggota DPR dan Diseminasi Informasi Hasil Pemantauan kepada Pemilih
- **Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur**
Pengembangan Social Audit Implementasi CSR Industri Ekstraktif yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Tuban
- **Garut Governance Watch (G2W)**
Memperkuat Partisipasi Masyarakat Sipil di Tingkat Lokal Melalui Praktik Audit Sosial Dalam Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Garut
- **Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI)**
Membangun Media Pendidikan Politik Bersama Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah untuk Mendorong Pemerintahan yang Demokratis, Responsif dan Tanggungjawab
- **Institute for Strategic Initiatives (ISI)**
Review on Good Governance Initiatives
- **Institute for Research and Empowerment (IRE)**
Advokasi Nasional melalui Kemitraan CSO dengan Parlemen untuk Mendorong Pembaharuan Desa Dalam Perumusan RUU Desa
- **Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)**
Peningkatan Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat melalui Pendidikan Politik dalam Pemilu Jakarta 2012
- **Koalisi Nasional Publish What You Pay**
Pertemuan Nasional/ Rapat Umum Anggota Koalisi Publish What You Pay - Indonesia
- **Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)**
Pendidikan Politik Masyarakat, Pemilih Pemula dan Pemantauan Dalam Pemilu Provinsi DKI Jakarta 2012
- **Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)**
Penelitian tentang Kontribusi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konsolidasi Demokrasi di Indonesia
- **Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa) Papua, Yayasan**
Pengorganisasian dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Melakukan Advokasi Guna Mendorong Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Kota Jayapura Provinsi Papua
- **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Untuk Perempuan (MAUPE)**
Penguatan Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Maros dalam Mendorong Gubernur Sulsel Yang Responsif Gender Melalui Pilgub 2013

- **Lembaga Studi Dan Advokasi Kebijakan (ELSAKA)**
Mendorong Peningkatan Kualitas Layanan JPKMS Melalui Perluasan Audit Sosial dan Advokasi Kebijakan
- **Malang Corruption Watch (MCW)**
Membangun Model Komunikasi (Constituent Meeting) Untuk Mengawasi Transparansi Pengelolaan Anggaran Pelayanan Pendidikan di Kota Malang
- **Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta**
Penguatan Warga Jakarta secara Partisipatif untuk Mendorong Responsifitas dan Akuntabilitas DPRD
- **Perkumpulan ALHARAKA**
Menyiapkan Gerakan Organisasi Aliansi KRJB Dalam Kontelasi Politik Lokal Menjelang Pilkada dan Pilkada 2013 di Kab. Jombang
- **Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**
Menumbuhkan Gerakan Masyarakat Sipil dalam Mengawal Proses Pelaksanaan Pemilu 2014
- **Solidaritas Perempuan (SP) Kendari**
Mendorong Partisipasi Aktif Perempuan Dalam Pemilihan Umum Kepala di Propinsi Sulawesi Tenggara
- **Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Nasional**
Memperkuat Peran dan Posisi Rakyat dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Sumber-sumber Kehidupan
- **Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD)**
Kajian Kritis dan Advokasi terhadap draft revisi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Berbasis Konsolidasi Jaringan Organisasi Sipil Kemasyarakatan
- **Yayasan Boan**
Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Dalam Upaya Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Bagi Warga Secara Terpadu dan Komprehensif
- **Yayasan Pusat Gerakan dan Advokasi Rakyat (PUGAR)**
Penilaian Masyarakat Terhadap Program Kesehatan Gratis "Studi Kasus Pada Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)" di Kabupaten Aceh tengah, Aceh Selatan dan Aceh Besar
- **Yayasan KOMUNIKATIF (Komunitas Kreator Visi Visual Alternatif)**
Dokumenter Pendidikan Pemilih (Voter Educaton) untuk Pemilukada DKI Jakarta
- **Yayasan Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM)**
Perluasan Praktek Audi Sosial melalui Mekanisme Pertanggungjawaban Publik Forum "Tudang Sipulung" oleh Pemerintah Kota Makassar
- **Yayasan Aksara**
Participatory Gender Audit Program Jampersal: Mendorong Pemerintahan Yang Responsif dan Akuntabel, untuk Memperluas Partisipasi Warga dalam Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Program-Program Pembangunan

Program: Media & Informasi

- **Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta**
Media dan Pilkada Bersih di Jakarta
- **Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon**
Kampanye Perlindungan Kebebasan Pers dan Peningkatan Profesionalisme Media Menuju Konsolidasi Demokrasi
- **Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia**
Advokasi Demokratisasi Penyiaran di Indonesia
- **Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar**
Pengembangan Klinik dan Pengajaran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Universitas Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Kedua
- **Centre for Learning and Advancing Experimental Democracy (Centre for LEAD)**
Membangun Pengawasan Media oleh Pesantren: Penguatan Kapasitas Literasi Media, Jejaring Kerja, dan Advokasi bagi Pendidikan Publik
- **Indonesian Parliamentary Center (IPC)**
Pengembangan Website Kebebasan Informasi Untuk Mendorong Kampanye, Pemahaman dan Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik
- **IMPARSIAL**
Advokasi RUU Keamanan Nasional Dalam Kerangka Menjaga Keberlangsungan Demokrasi dan Penegakan HAM
- **Indonesia Budget Center (IBC)**
Pemanfaatan Akses Informasi Anggaran Untuk Memantau Kinerja Kepala Daerah Dalam
- **Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)**
Revisi RUU Riskan sebagai draft alternatif RUU Rahasia Negara yang diajukan oleh pemerintah ke DPR
- **Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS)**
Melek Media Televisi untuk Guru pada Lima SMA di Medan
- **Klinik Keterbukaan Informasi Publik (Klinik KIP), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**
Pengembangan Klinik dan Pengajaran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Universitas Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Kedua
- **Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya**
Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat sipil dalam menggunakan hak atas informasi untuk memperoleh hak atas keadilan dalam kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Jawa Timur
- **Komite Anti Korupsi (KoAK) Lampung**
Pemantauan Pengelolaan Dana BOS oleh Wali Murid di Kota Bandar Lampung menggunakan Akses Informasi Publik
- **Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama dan Kebudayaan**
Perbaikan Tata Kelola Penempatan dan Penangan Buruh Migran Perbaikan Tata Kelola Informasi pada Lembaga Penyelenggara Penempatan, Pengawasan dan Penanganan Buruh Migran Indonesia (BMI)

- **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang**
Mendorong Hak Akses Informasi, Hak Akses Partisipasi dan Hak Akses Keadilan dalam Penataan Ruang di Jawa Tengah
- **Lembaga Studi Pers & Informasi (LeSPI)**
Mengembangkan Jejaring Komunitas Pemantau Siaran TV
- **Lembaga Bantuan Hukum (LBH Pers) Padang**
Peningkatan Pengetahuan Hukum untuk Membangun Akses Bantuan Hukum Bagi Jurnalis
- **Lembaga Bela Banua Talino (LBBT)**
Pemanfaatan Hak atas Informasi dan Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Adat Guna pemenuhan Akses Terhadap Keadilan di Kalimantan Barat
- **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers**
Workshop Advokat Berperspektif Pers
- **Perkumpulan Air Putih**
Pengembangan Akses Informasi Publik Berbasis Situs Web
- **Pusat Kajian Media dan Budaya Populer (PKMBP)**
Model-Model Gerakan Literasi Media di Indonesia: Pengalaman dari Lapangan
- **Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA)**
Digitalisasi di Indonesia: Peta Persoalan, Advokasi, dan Agenda ke Depan
- **Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI)**
Mendorong Profesionalisme Media dalam pengelolaan Dana Sosial Masyarakat melalui Penerapan Etika Filantropi Media
- **Perkumpulan Media Lintas komunitas (Media Link)**
Pengembangan Model Pemanfaatan Akses Informasi Berbasis Komunitas
- **Ruangrupa**
Hak warga atas ruang publik Jakarta di tengah dominasi iklan ruang luar
- **Remotivi**
Pendidikan Melek Televisi untuk Orang Muda
- **Rumah Film**
Penelitian Film Bertema Islam di Indonesia
- **Yayasan Teater Garasi**
Program Penciptaan Seni Pertunjukan Berdasarkan Isu Sosial Strategis
- **Yayasan Bingkai**
Program Riset, Penulisan Skenario, dan Novel Film Pernikahan Beda Agama
- **Yayasan Ladang Media**
Pengembangan Video Advokasi bagi Isu Strategis di Serang, Jepara dan Lampung

Program: HAM & Keadilan

- **Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP)**
Merawat Dukungan Pada Proses Pra Dialog Jakarta Papua
- **Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK)**
Advokasi Revisi Undang-Undang No.39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri (PPTKILN)
- **Center for Research on Inter group Relations and Conflict Resolution (CERIC) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia**
Action Research Pemetaan Konflik antara Sekolah di Jakarta
- **Center for Extension and Empowerment Studies (CEES)**
Mencapai Kedaulatan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Urban
- **Clinical Legal Education (Program Pendidikan Klinis Hukum) Fakultas Hukum Universitas Pasundan (FH-UNPAS)**
Peningkatan soft skill mahasiswa fakultas hukum melalui Street Law Clinic
- **Epistema Institute**
Membangun arsitektur negara hukum Indonesia yang berkeadilan eko-sosial melalui Filsafat Hukum Pancasila
- **Institut Toleransi Keberagaman dan Pelestarian Lingkungan (ILALANG)**
Revitalisasi Pancasila di kalangan mahasiswa sebagai upaya mewujudkan visi Papua Tanah Damai
- **Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK)**
Pendidikan Kesadaran Dalam Proses Pemberdayaan Hak-Hak dan Keterampilan Berorganisasi Buruh Migran Serta Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Komunitas-Komunitas Basis Buruh Migran Beserta Keluarga di Tulung Agung
- **Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA)**
Pembelaan dan pemajuan hak konstitusional rakyat atas tanah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi
- **Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)**
Human Rights School for Students (SEHAMA) 2012
- **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar**
Penguatan dan Pengembangan Program Bantuan Hukum Gratis Pemkot Makassar Dalam Mewujudkan Access to Justice LBH Makassar
- **Lembaga Studi Islam dan Politik (LSIP)**
Diseminasi Pendidikan Multikultural di SD-SMP-SMA/K Melalui Pendidikan Agama di DIY (Yogyakarta, Gunungkidul, Bantul, Sleman, Kulonprogo) dan Jateng (Magelang)
- **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Tengah**
Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal Dan Rentan Di Provinsi Sulawesi Tengah
- **Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)**
Pengarusutamaan Multikulturalisme di Sekolah
- **Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan**
Mendorong Pertanggungjawaban Negara atas Pelanggaran HAM Masa Lalu di Indonesia

- **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang**
Akses Keadilan Bagi Petani Dalam Pengelolaan dan Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam
- **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang**
Penguatan Eksistensi Paralegal Organisasi Rakyat (OR) Dampingan LBH Padang dan Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Marjinal
- **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta**
Penguatan kelembagaan paralegal ditengah-tengah masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan skill hukum paralegal untuk menunjang kerja-kerja bantuan hukum di DI Yogyakarta
- **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta**
Mempromosikan pluralisme dan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia melalui pengajuan Rancangan Undang-Undang Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan dan Pengembangan Paralegal serta Perluasan Dukungan Masyarakat
- **Lembaga Analisis Informasi (ESSAI)**
Pentas Teater Rakyat: Membaca Kembali Pancasila
- **PERDU**
Mendorong Perlindungan Sumber-Sumber Pangan Lokal dan Akses Masyarakat atas Pangan
- **Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta**
Pembudayaan Pendidikan Karakter Bangsa melalui Training Kebangsaan
- **Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPOTODA)**
Rekonstruksi dan Monitoring Peraturan Perundang Undangan dalam Perizinan Pendirian Tempat Ibadah (Studi Pemetaan Kebijakan dan Perizinan di Wilayah Jawa Timur, NTT, Bali, dan Jawa Barat)
- **Pontianak Institute for Kalimantan Studies (PI)**
Promosi Reformasi Birokrasi Mekanisme Produksi Pangan Turun Temurun Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal Lain di Kabupaten Sambas dan Bengkayang
- **Pusat Studi Kebijakan Pendidikan - IAIN Surakarta**
Model Pendidikan Pancasila sesuai dengan semangat Kurikulum Tingkat Satuan di Madrasah Ibtidaiyah Se Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah
- **Perkumpulan Peduli Buruh Migran**
Advokasi kebijakan terhadap hak kesehatan dan klaim asuransi buruh migran
- **Perkumpulan Panca Karsa Mataram**
Membangun Mekanisme Publik untuk mendorong Kapasitas Kelembagaan KPTKI
- **The RIDEP Institute**
Advokasi UU Penanganan Konflik Sosial Melalui Judicial Review Mahkamah Konstitusi
- **Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Nasional**
Advokasi Kebijakan Tindak Lanjut Putusan Judicial Review Undang-Undang no 4 tahun 2009 tentang Pertambang Mineral dan Batu Bara

- **Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS)**
Perdalam Advokasi Kedaulatan Pangan: Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sebagai Hak Asasi
- **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta**
Pemantauan dan Harmonisasi Implementasi UU Bantuan dalam Mendorong Perda Bantuan Hukum
- **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan (YLBHL)**
Mengawal Proses Mediasi Lanjutan: Fasilitasi Lanjutan Penyelesaian Konflik Kepemilikan Lahan antara Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Kelompok 113 Dusun Lamo Pinang Tinggi dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Asiatic Persada di Kab Batanghari Jambi

Program: Perlindungan Buruh Migran – AusAID

- **Delsos – Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (Komisi PSE) Keuskupan Larantuka**
"TANGGA MIGRAN" Peningkatan Keuangan Keluarga Melalui Migrasi Aman
- **Koslata**
Penguatan Tata Kelola usaha Remitansi dalam rangka Pengurangan kemiskinan bagi pekerja migran di 10 desa di Kabupaten Sumbawa
- **Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia ADBMI Lotim**
Penurunan Derajat Kemiskinan Dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi Komunitas BMI di 10 Desa Pengirim Utama Di Kabupaten Lombok Timur
- **Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PPSE-KA)**
Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Keluarga Buruh Migrant di Tempat Asal
- **Rumah Perempuan Kupang – NTT**
Pengentasan Kemiskinan Melalui Migrasi Aman

Laporan Tahunan 2012

PUBLIKASI



IBC
APBD yang Tergerus



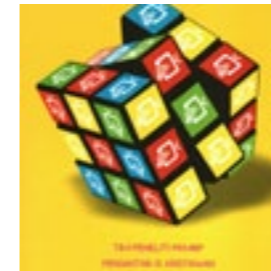
CEES
Kisah Meja Makan



Malang Corruption Watch
Merebut Hak yang Terampas



Perludem
Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator



PKMBP
Model Literasi Media



PR2 Media
Digitalisasi TV



CERIC
Upaya Identifikasi & Penanggulangan Tawuran Pelajar Atau Remaja



ELSAM
Intimidasi & Kebebasan



ruangrupa
Publik dan Reklame di Ruang Kota Jakarta



YKPM
Meniti Harapan Perubahan Melalui Gerakan Audit Sosial



FIELD
Bersemi Dalam Tekanan Global



KOAK
Mengawal Dana Pendidikan



Tempo Institute
Riset KIP



Memahami Hukum PERS



Kode Etik Filantropi Media Massa



IMPARSIAL
Dilema Pengaturan Keamanan Nasional



AJI Jakarta
Reportase Jurnal Laporan Investigasi



PIRAC
Membangun Akuntabilitas Filantropi Media Massa

LAPORAN TAHUNAN 2012

LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2012 & 2011

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain, dan Dolar AS ("USD"))

	Catatan	2012		2011	
		IDR	Dollar AS *)	IDR	Dollar AS *)
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	4	14.082.967	1.456.357	3.968.102	437.594
Piutang dari donatur	5	16.246.283	1.680.070	17.807.322	1.963.753
Uang muka		2.764.573	285.892	735.262	81.084
Beban dibayar di muka		186.497	19.286	172.536	19.027
Jumlah aset lancar		33.280.320	3.441.605	22.683.222	2.501.458
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap, bersih	6	4.875.741	504.213	4.951.696	546.063
JUMLAH ASET		38.156.061	3.945.818	27.634.918	3.047.521
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang dana bantuan	7	21.256.643	2.198.205	13.780.263	1.519.658
Akrual dan utang lain-lain		142.604	14.746	187.400	20.666
Utang pajak		5.391	558	134.772	14.863
Pendapatan tangguhan	8	2.104.576	217.640	456.586	50.351
Jumlah liabilitas lancar		23.509.214	2.431.149	14.559.021	1.605.538
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Kewajiban imbalan kerja	9	6.066.127	627.314	5.109.506	563.466
JUMLAH LIABILITAS		29.575.341	3.058.463	19.668.527	2.169.004
ASET BERSIH					
Aset bersih yang tidak terikat		4.179.617	428.418	3.678.951	426.022
Aset bersih yang terikat		4.401.103	458.755	4.287.440	452.313
Selisih penjabaran mata uang asing kumulatif		-	182	-	182
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH		38.156.061	3.945.818	27.634.918	3.047.521

LAPORAN AKTIVITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain, dan Dolar AS ("USD"))

	Catatan	2012		2011	
		IDR	Dollar AS *)	IDR	Dollar AS *)
PENDAPATAN					
Pendapatan					
sumbangan – terikat	10	53.689.980	5.639.486	44.332.064	5.046.516
Pengembalian dana bantuan dari tahun sebelumnya	11	2.067.812	219.736	1.537.876	174.180
Jasa manajemen	12	108.126	11.766	802.334	88.479
Keuntungan selisih kurs, bersih		981.881	63.473	64.354	10.995
Penghasilan bunga		172.098	18.124	28.008	3.186
Lain-lain		35.466	3.718	374.866	41.767
Jumlah pendapatan		57.055.363	5.956.285	47.139.502	5.365.123
BEBAN					
Dana bantuan		37.428.398	3.931.978	29.036.015	3.317.376
Gaji & upah		7.767.106	825.666	6.573.049	750.737
Imbalan kerja		2.522.589	264.034	2.919.184	327.267
Konferensi & rapat		1.081.180	114.649	1.994.012	224.470
Tiket pesawat		2.128.758	224.286	1.224.782	138.663
Jasa profesional & konsultasi		1.560.631	166.014	1.209.736	137.873
Perjalanan – hotel		661.137	70.067	503.459	57.961
Transportasi lokal		682.660	72.218	376.853	42.784
Perjalanan – makanan & jamuan		605.608	64.030	339.920	39.206
Penyusutan		353.867	36.594	310.258	34.215
Perlengkapan kantor		298.417	32.468	179.929	20.441
Pengembangan pelatihan karyawan		217.120	23.481	150.208	17.084
Peralatan kantor lainnya		79.189	8.396	141.215	15.939
Layanan internet		133.484	14.240	140.088	15.916
Utilitas		116.103	12.386	121.770	13.822
Lain-lain		804.787	86.940	685.699	77.004
Jumlah beban		56.441.034	5.947.447	45.905.547	5.230.758
Perubahan aset bersih		614.329	8.838	1.233.955	134.365

	Catatan	2012		2011	
		IDR	Dollar AS *)	IDR	Dollar AS *)
ASET BERSIH					
Awal Tahun:					
Terikat		3.678.951	426.022	3.460.647	426.022
Tidak terikat		4.287.440	452.313	3.271.788	317.948
Selisih penjabaran mata uang asing kumulatif		-	182	-	4.827
		7.966.391	878.517	6.732.435	748.797

LAPORAN AKTIVITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain, dan Dolar AS ("USD"))

	2012		2011		
	Catatan	IDR	Dollar AS *)	IDR	Dollar AS *)
Perubahan aset bersih tahun berjalan:					
Terikat		500.666	2.396	218.304	-
Tidak terikat		113.663	6.442	1.015.652	134.365
		614.329	8.838	1.233.956	134.365
Selisih penjabaran mata uang asing		-	-	-	4.645
Akhir tahun:					
Terikat		4.179.617	428.418	3.678.951	426.022
Tidak Terikat		4.401.103	458.755	4.287.440	452.313
Selisih penjabaran mata uang kumulatif		-	182	-	182
		8.580.720	887.355	7.966.391	878.517

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain, dan Dolar AS ("USD"))

	2012		2011		
	Catatan	IDR	Dollar AS *)	IDR	Dollar AS *)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:					
Perubahan aset bersih		614.329	8.838	1.233.955	134.365
Penambahan/ (pengurangan) item yang tidak berpengaruh pada arus kas operasi:					
Penyusutan	6	353.867	36.594	310.258	34.215
Kerugian atas pelepasan aset tetap		6.024	623	-	-
Provisi untuk imbalan kerja (bersih)		1.324.480	140.633	1.612.843	174.559
ARUS KAS OPERASI SEBELUM PERUBAHAN ASET & LIABILITAS:		2.298.700	186.688	3.157.056	343.139
PERUBAHAN ASET & LIABILITAS:					
Piutang dari donatur		1.561.039	283.683	109.606	29.009
Uang muka		(2.029.311)	(204.808)	(250.278)	(27.143)
Beban dibayar di muka		(13.961)	(259)	1.674	349
Utang dana bantuan Akrua & utang lain-lain		7.476.380	678.547	1.546.231	158.960
Utang pajak		(44.796)	(5.920)	(23.105)	(2.747)
Pendapatan tanggungan		(129.381)	(14.305)	(7.785)	(992)
Pembayaran kewajiban imbalan kerja		1.647.990	167.289	(1.698.162)	(189.305)
		(367.859)	(38.041)	-	-
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		10.398.801	1.052.874	2.835.237	311.270

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain, dan Dolar AS ("USD"))

	Catatan	2012		2011	
		IDR	Dollar AS *)	IDR	Dollar AS *)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:					
Pembelian aset tetap	6	(283.936)	(29.363)	(300.387)	(33.127)
KENAIKAN BERSIH KAS & SETARA KAS UNTUK TAHUN BERJALAN		10.114.865	1.023.511	2.534.850	278.143
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		3.968.102	437.594	1.433.252	159.410
SELISIH PENJABARAN MATA UANG ASING		-	(4.748)	-	41
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4	14.082.967	1.456.357	3.968.102	437.594

1. UMUM

Yayasan TIFA ("TIFA") didirikan sebagai sebuah organisasi nirlaba pada tanggal 8 Desember 2000 berdasarkan Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H. No. 17.

Tujuan TIFA adalah mempromosikan masyarakat yang terbuka di Indonesia

yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan persamaan. TIFA fokus pada enam program prioritas, yaitu Tata Kelola, Hak Asasi Manusia, Media, Masyarakat Sipil dan Demokrasi, Kewarganegaraan dan Keadilan, dan Pekerja Migran.

TIFA mempunyai visi terciptanya sebuah komunitas di mana masyarakat,

pemerintah, dan pebisnis mendukung hak-hak setiap individu, khususnya hak-hak wanita, kaum minoritas dan kelompok yang disadvantaged, serta mengembangkan solidaritas dan tata kelola yang baik.

Kantor TIFA berkedudukan di Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, susunan anggota dewan adalah sebagai berikut:

PENGAWAS:

2012
Tosca Santoso

PEMBINA:

2012
Ketua: Felia Salim
Anggota: Goenawan Mohammad
Todung Mulya Lubis
Daniel Dhakidae

PENGURUS:

2012
Ketua: Yuli Ismartono
Wakil: Lukas Luwarso
Anggota: Luthfi Assyaukanie
Ifdhal Kasim
Pater Neles Tebay
Miryam Nainggolan
Riefqi Muna
Debra Yatim

PENGAWAS:

2011
Tosca Santoso
Bambang Widjojanto

PEMBINA:

2011
Ketua: Felia Salim
Anggota: Goenawan Mohammad
Todung Mulya Lubis
Daniel Dhakidae

PENGURUS:

2011
Ketua: Yuli Ismartono
Wakil: Lukas Luwarso
Anggota: Luthfi Assyaukanie
Ifdhal Kasim
Pater Neles Tebay
Miryam Nainggolan
Riefqi Muna
Debra Yatim

Manajemen eksekutif bertanggung jawab untuk mengelola aktivitas sehari-hari TIFA, yang kemudian diawasi oleh Direksi.

Pada tanggal 31 Desember 2012, TIFA mempunyai 22 karyawan permanen (2011: 22 karyawan permanen).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain, dan Dolar AS (“USD”))

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan TIFA disusun oleh manajemen berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disahkan oleh Direksi pada tanggal 25 Juni 2013.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan TIFA, yang telah diterapkan secara konsisten pada semua tahun yang disajikan. masyarakat yang terbuka di Indonesia

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan konsep akrual.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45, “Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba” yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, aktivitas, dan arus kas.

Nilai untuk masing-masing kelompok aset bersih (terikat dan tidak terikat) dilaporkan berdasarkan keberadaan atau ketiadaan batasan donatur.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung dengan mengklasifikasikan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Untuk tujuan laporan arus kas; kas dan setara kas mencakup kas, bank, dan deposito berjangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, jika ada.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) yang Berlaku Efektif di Tahun 2012

TIFA melakukan penerapan PSAK baru atau revisi yang berlaku efektif di tahun 2012. Perubahan kebijakan akuntansi TIFA telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar baru atau revisi berikut, yang relevan dengan operasi TIFA, tidak menimbulkan efek signifikan pada kebijakan akuntansi TIFA dan tidak mempunyai pengaruh yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau sebelumnya:

- PSAK 10 (revisi 2010): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap
- PSAK 24 (revisi 2010): Imbalan Kerja
- PSAK 45 (revisi 2010): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
- PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Penarikan kebijakan akuntansi berikut, yang relevan pada operasi TIFA, tidak menimbulkan efek signifikan pada kebijakan akuntansi TIFA dan tidak mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau sebelumnya:

- PSAK 11: Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing
- PSAK 52: Akuntansi Mata Uang Pelaporan

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mensyaratkan untuk menggunakan estimasi akuntansi tertentu yang signifikan.

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia juga mensyaratkan manajemen untuk melakukan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Yayasan.

Area-area yang melibatkan tingkat yang lebih tinggi pada pertimbangan atau kompleksitas, atau area-area di mana asumsi dan estimasi merupakan hal yang signifikan terhadap laporan keuangan disajikan di Catatan 15.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain, dan Dolar AS (“USD”))

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Mata uang fungsional TIFA adalah Rupiah Indonesia (“IDR”) dan TIFA melakukan pencatatan akuntansi dalam Rupiah. Transaksi dalam mata uang selain Rupiah (mata uang asing) dijabarkan ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan aktivitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

TIFA mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang serta liabilitas keuangan sebagai liabilitas keuangan lainnya. Pengklasifikasian berdasarkan tujuan dari aset dan liabilitas keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan pada pengakuan awal.

Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap atau yang dapat ditentukan dan tidak dikutip pada pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang TIFA terutama meliputi kas dan setara kas, dan piutang dari donatur dalam laporan

posisi keuangan.

Liabilitas Keuangan Lain-Lain

Liabilitas keuangan lain-lain adalah liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan lain-lain TIFA terutama meliputi utang dana bantuan, akrual dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan.

d. Pendapatan dan Beban

Sumbangan terikat adalah dana yang diterima untuk mendukung proyek atau kegiatan tertentu yang disepakati satu sama lain oleh TIFA dan donatur.

Sumbangan terikat dapat dibatasi penggunaannya secara temporer atau permanen. Sumbangan terikat secara temporer adalah sumbangan yang penggunaannya oleh TIFA ditunda oleh donatur hingga jangka waktu di kemudian hari atau setelah tanggal tertentu atau untuk tujuan tertentu.

Sumbangan terikat secara permanen adalah sumbangan yang penggunaannya oleh TIFA dibatasi oleh donatur atau yang perolehan manfaat ekonomisnya dibatasi walaupun berakhirnya jangka waktu atau terpenuhinya persyaratan oleh TIFA.

Pendapatan sumbangan TIFA terikat secara temporer.

Pendapatan sumbangan dicatat dengan basis akrual, yaitu ketika TIFA berhak atas pendapatan berdasarkan syarat dan ketentuan dari sumbangan tersebut. Sumbangan yang terikat dicatat sebagai pendapatan tangguhan ketika diterima, dan kemudian diakui

sebagai pendapatan ketika proyek atau kegiatan yang bersangkutan disepakati oleh kedua belah pihak dan pengalokasian dari sumbangan yang terikat secara temporer telah dilakukan, dimana pada saat beban proyek yang bersangkutan telah terjadi.

Kekurangan atas dana yang diterima dibandingkan dengan beban yang terjadi dicatat sebagai piutang dari donatur.

Pendapatan lainnya diakui pada saat diperoleh.

Beban dicatat ketika terjadi atas dasar akrual. Beban yang berkaitan dengan dana bantuan yang diberikan TIFA diakui ketika perjanjian dana bantuan ditandatangani oleh TIFA dan penerima dana bantuan.

Apabila dana bantuan diberikan dengan persyaratan, beban dana bantuan dicatat ketika penerima dana bantuan memenuhi kondisi atau kemungkinan terjadinya kondisi menjadi jarang.

e. Pengembalian Dana Bantuan dari Tahun-Tahun Sebelumnya

Pengembalian dana bantuan diakui ketika dana yang bersangkutan telah dikembalikan oleh penerima dana bantuan atau ketika liabilitas sehubungan dengan dana bantuan dibatalkan (biasanya dikarenakan penerima dana bantuan gagal untuk memenuhi persyaratan dana bantuan).

Pengembalian dana bantuan dicatat di tahun ketika dana diterima dari penerima dana bantuan, atau perjanjian dengan penerima dana bantuan dibatalkan.

f. Aset Tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat yang diekspektasi sebagai berikut:

Bangunan kantor
Perabot dan perlengkapan
Kendaraan
Peralatan komputer

	tahun
Bangunan kantor	20
Perabot dan perlengkapan	4
Kendaraan	4
Peralatan komputer	4

Tanah tidak disusutkan.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar TIFA akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal.

Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan aktivitas ketika terjadi.

Nilai residu dan masa manfaat aset tetap ditelaah dan disesuaikan jika perlu, pada setiap tanggal pelaporan.

Nilai tercatat aset segera diturunkan menjadi jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, serta keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan aktivitas.

TIFA melakukan penelaahan untuk menentukan apakah ada indikasi terjadinya penurunan nilai aset. TIFA menentukan taksiran jumlah yang dapat dipulihkan apabila terdapat situasi atau keadaan yang mengindikasikan

terjadinya penurunan nilai aset, yang ditentukan lebih tinggi antara nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai aset. Ketika nilai tercatat aset lebih tinggi dari taksiran jumlah yang dapat dipulihkan, aset tersebut diturunkan nilainya ke jumlah yang dapat dipulihkan.

g. Pajak penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1994 yang diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 mengenai taksiran pajak penghasilan untuk yayasan atau entitas sejenis, sumbangan yang diterima dari pemberi sumbangan atau donatur bukan merupakan objek pajak selama tidak ada hubungan antara donatur dan penerima.

h. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Kewajiban pensiun

Imbalan kerja, seperti pensiun, pesangon, penghargaan masa kerja, dan kompensasi dihitung berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") TIFA dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-Undang 13/2003").

Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti adalah nilai kini dari kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan setelah dikurangi nilai wajar aset program, jika ada, dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas estimasian di masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu jatuh tempo yang mendekati jangka waktu kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan dalam asumsi aktuarial yang melebihi jumlah yang lebih besar antara 10% nilai kini kewajiban imbalan pasti atau 10% nilai wajar aset program akan dibebankan atau dikreditkan ke laporan aktivitas selama rata-rata sisa masa kerja yang diharapkan dari pekerja. Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika TIFA memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. TIFA mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika dapat ditunjukkan bahwa TIFA berkomitmen untuk melakukan pemberhentian kerja atas

karyawan yang bekerja saat ini dengan adanya perencanaan formal yang rinci untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawan; atau memberikan imbalan kerja sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan aktivitas, kecuali yang akan diberikan apabila karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode vesting). Dalam hal ini, biaya jasa lalu akan diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode vesting tersebut.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti besar, dihitung berdasarkan PKB TIFA, dan menggunakan metode projected unit credit dan didiskontokan ke nilai kini. Kewajiban imbalan pasti juga dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen.

i. Penurunan aset keuangan

Pada akhir setiap periode pelaporan, TIFA melakukan penilaian adanya bukti objektif penurunan aset keuangan atau kelompok aset keuangan. Penurunan aset keuangan dan kelompok aset keuangan dan kerugian penurunan terjadi hanya apabila

ada bukti objektif atas penurunan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset ("peristiwa rugi") dan peristiwa rugi tersebut mempunyai dampak terhadap arus kas masa depan yang diestimasi atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari arus kas masa depan yang diestimasi (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto dengan suku bunga efektif dari aset tersebut. Nilai tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugiannya diakui di laporan aktivitas.

3. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DOLAR AMERIKA SERIKAT

Mata uang fungsional TIFA adalah Rupiah (IDR). Penyajian laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan dalam Dolar Amerika Serikat hanya untuk kemudahan para pembaca dan bukan bagian dari

laporan keuangan.

Kurs yang digunakan untuk penjabaran adalah sebagai berikut:

- Transaksi dalam laporan aktivitas dijabarkan ke dalam Dolar AS menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi.
- Semua akun dalam laporan posisi

keuangan dijabarkan ke dalam Dolar AS menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yaitu 1 Dolar AS = IDR 9.670 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 1 Dolar AS = IDR 9.068 pada tanggal 31 Desember 2011.

Selisih penjabaran diakui sebagai komponen terpisah dari aset bersih.

4. KAS DAN SETARA KAS

	2012		2011	
	IDR	Dollar AS *)	IDR	Dollar AS *)
KAS				
Rupiah	9.999	1.034	5.000	550
Dolar AS	574	60	6	1
KAS DI BANK				
Rupiah	9.841.191	1.017.703	3.126.613	344.797
Dolar AS	4.231.203	437.560	836.483	92.246
	14.082.967	1.456.357	3.968.102	437.594

*) Pada tanggal 31 Desember 2012, Dolar AS di bank mencakup kas dari World Bank (donatur pihak ketiga) sejumlah USD 37.296 (2011: USD 14.606). Jumlah yang diterima dari World Bank dan beban yang terjadi sehubungan dengan proyek World Bank di tahun 2012 masing-masing sebesar USD 503.767 dan USD 464.966 (2011: masing-masing sebesar USD 95.118 dan USD 165.437).

5. PIUTANG DARI DONATUR

	2012		2011	
	IDR	Dollar AS *)	IDR	Dollar AS *)
Piutang dari Open Society Foundation ("OSF")	14.810.975	1.531.642	17.807.322	1.963.753
Piutang dari donatur pihak ketiga	1.435.308	148.428		
	16.246.283	1.680.070	17.807.322	1.963.753

Akun ini merupakan akun untuk kekurangan dana yang diterima dari donatur dibandingkan dengan beban yang terjadi. Manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang dapat ditagih. Piutang akan tertagih dari donatur dalam waktu enam bulan hingga satu tahun.

*) Laporan keuangan Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") ("USD") disajikan hanya untuk kemudahan bagi para pembaca dan bukan bagian dari laporan keuangan. Lihat Catatan 3 untuk dasar penjabaran.

*) Laporan keuangan Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") ("USD") disajikan hanya untuk kemudahan bagi para pembaca dan bukan bagian dari laporan keuangan. Lihat Catatan 3 untuk dasar penjabaran.

	2012									
	Biaya perolehan 1 Januari	Penambahan	Pelepasan	Biaya perolehan 31 Desember	Akumulasi penyusutan 1 Januari	Penambahan	Pelepasan	Akumulasi penyusutan 31 Desember	Selisih penjabaran mata uang	Nilai buku bersih
	IDR	IDR	IDR	IDR	IDR	IDR	IDR	IDR	IDR	IDR
Tanah	2.992.435			2.992.435						2.992.435
Bangunan kantor	1.999.784	36.979		2.036.763	568.701	97.185		665.886		1.370.877
Perabot dan perlengkapan	241.375			241.375	167.289	25.252		192.541		48.834
Peralatan komputer	1.311.864	240.101	(13.767)	1.538.198	1.100.387	158.947	(7.743)	1.251.591		286.607
Piranti lunak	86.385	6.856		93.241	82.722	2.521		85.243		7.998
Kendaraan	290.150			290.150	51.198	69.962		121.160		168.990
	6.921.993	283.936	(13.767)	7.192.162	1.970.297	353.867	(7.743)	2.316.421		4.875.741

	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)
Tanah	305.725			305.725					3.730	309.455
Bangunan kantor	211.298	3.824		215.122	60.252	10.050		70.302	(3.054)	141.766
Perabot dan perlengkapan	24.768			24.768	16.913	2.611		19.524	(195)	5.049
Peralatan komputer	132.052	24.830	(1.424)	155.458	115.434	16.437	(801)	131.070	5.251	29.639
Piranti lunak	9.109	709		9.818	8.635	261		8.896	(95)	827
Kendaraan	30.944			30.944	4.965	7.235		12.200	(1.267)	17.477
	713.896	29.363	(1.424)	741.835	206.199	36.594	(801)	241.992	4.370	504.213

*) Laporan keuangan Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") ("USD") disajikan hanya untuk kemudahan bagi para pembaca dan bukan bagian dari laporan keuangan. Lihat Catatan 3 untuk dasar penjabaran.

*) Laporan keuangan Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") ("USD") disajikan hanya untuk kemudahan bagi para pembaca dan bukan bagian dari laporan keuangan. Lihat Catatan 3 untuk dasar penjabaran.

	2011									
	Biaya perolehan 1 Januari	Penambahan	Pelepasan	Biaya perolehan 31 Desember	Akumulasi penyusutan 1 Januari	Penambahan	Pelepasan	Akumulasi penyusutan 31 Desember	Selisih penjabaran mata uang	Nilai buku bersih
	IDR	IDR	IDR	IDR	IDR	IDR	IDR	IDR	IDR	IDR
Tanah	2.992.435			2.992.435						2.992.435
Bangunan kantor	1.999.784			1.999.784	471.516	97.185		568.701		1.431.083
Perabot dan perlengkapan	239.980	1.395		241.375	140.482	26.807		167.289		74.086
Peralatan komputer	1.277.772	34.092		1.311.864	957.082	143.305		1.100.387		211.477
Piranti lunak	86.385			86.385	76.610	6.112		82.722		3.663
Kendaraan	25.250	264.900		290.150	14.349	36.849		51.198		238.952
	6.621.606	300.387		6.921.993	1.660.039	310.258		1.970.297		4.951.696
	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)	DOLAR AS*)
Tanah	305.725			305.725					24.274	329.999
Bangunan kantor	211.298			211.298	49.535	10.717		60.252	6.771	157.817
Perabot dan perlengkapan	24.614	154		24.768	13.957	2.956		16.913	316	8.171
Peralatan komputer	128.292	3.760		132.052	99.630	15.804		115.434	6.703	23.321
Piranti lunak	9.109			9.109	7.961	674		8.635	(70)	404
Kendaraan	1.731	29.213		30.944	901	4.064		4.965	372	26.351
	680.769	33.127		713.896	171.984	34.215		206.199	38.366	546.063

TIFA memiliki tanah seluas 429 meter persegi dengan sertifikat Hak Guna Bangunan yang berlaku hingga 2009, dan telah diperpanjang hingga 2029. Manajemen berkeyakinan bahwa hak atas tanah tersebut masih dapat diperbaharui ketika masa berlakunya berakhir.

*) Laporan keuangan Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") ("USD") disajikan hanya untuk kemudahan bagi para pembaca dan bukan bagian dari laporan keuangan. Lihat Catatan 3 untuk dasar penjabaran.

*) Laporan keuangan Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") ("USD") disajikan hanya untuk kemudahan bagi para pembaca dan bukan bagian dari laporan keuangan. Lihat Catatan 3 untuk dasar penjabaran.

7. UTANG DANA BANTUAN

Akun ini merupakan akrual untuk program yang perjanjian dana bantuannya telah ditandatangani oleh TIFA dan penerima dana bantuan di masing-masing tahun.

	2012		2011	
	IDR	Dollar AS *)	IDR	Dollar AS *)
SUMBER DANA DAN BANTUAN:				
OSF	15.080.373	1.559.500	13.763.129	1.517.768
AusAID	6.164.724	637.511		
Microsoft Indonesia	11.546	1.194	17.134	1.890
	21.256.643	2.198.205	13.780.263	1.519.658

Pelunasan utang dana bantuan oleh TIFA kepada penerima dana bantuan dalam waktu satu bulan.

8. PENDAPATAN TANGGUHAN

	2012		2011	
	IDR	Dollar AS *)	IDR	Dollar AS *)
World Bank	2.104.576	217.640	456.586	50.351

9. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dihitung oleh aktuaris independen, Biro Pusat Aktuaris, dengan asumsi utama sebagai berikut:

	2012
a. Tingkat diskonto	: 6% per tahun (2011: 7%)
Tingkat diskonto	
b. Tingkat kenaikan gaji	: 8% per tahun (2011: 9%)
c. Tingkat mortalitas	: Tabel Mortalitas Indonesia 2011
d. Tingkat cacat	: 10% dari Tabel Mortalitas Indonesia 2011
e. Tingkat pengunduran diri	: 6% dari karyawan dengan umur di bawah 30 tahun dan menurun secara garis lurus ke 0% pada umur 52 tahun
f. Umur pensiun	: 65 tahun

*) Laporan keuangan Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") ("USD") disajikan hanya untuk kemudahan bagi para pembaca dan bukan bagian dari laporan keuangan. Lihat Catatan 3 untuk dasar penjabaran.

Kewajiban imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut:

	2012		2011	
	IDR	Dollar AS *)	IDR	Dollar AS *)
Nilai Kini Kewajiban	6.193.803	640.517	5.669.352	625.204
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(6.316)	(653)	(7.639)	(842)
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(121.360)	(12.550)	(552.207)	(60.896)
	6.066.127	627.314	5.109.506	563.466

Nilai yang diakui di laporan aktivitas adalah sebagai berikut:

	2012		2011	
	IDR	Dollar AS *)	IDR	Dollar AS *)
Saldo awal	5.109.506	563.466	3.496.663	388.907
Provisi selama tahun berjalan	1.324.480	140.633	1.612.843	177.861
Imbalan yang dibayarkan selama tahun berjalan	(367.859)	(38.041)		
Selisih penjabaran mata uang asing		(38.744)		(3.302)
Saldo Terakhir	6.066.127	627.314	5.109.506	563.466

10. PENDAPATAN SUMBANGAN-TERIKAT

	2012		2011	
	IDR	Dollar AS *)	IDR	Dollar AS *)
OSF	41.333.709	4.361.674	42.589.186	4.854.315
AusAID	9.234.079	954.920		
World Bank	3.122.192	322.874	1.584.460	174.731
Microsoft Indonesia			158.418	17.470
	53.689.980	5.639.468	44.332.064	5.046.516

*) Laporan keuangan Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") ("USD") disajikan hanya untuk kemudahan bagi para pembaca dan bukan bagian dari laporan keuangan. Lihat Catatan 3 untuk dasar penjabaran.

11. PENGEMBALIAN DANA BANTUAN DARI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

	2012		2011	
	IDR	Dollar AS *)	IDR	Dollar AS *)
OSF	2.053.828	218.220	1.535.319	173.882
Microsoft Indonesia	13.984	1.516	2.557	298
	2.067.812	219.736	1.537.876	174.180

12. JASA MANAJEMEN

	2012		2011	
	IDR	Dollar AS *)	IDR	Dollar AS *)
World Bank	108.126	11.766		
Microsoft Indonesia			802.334	88.479
	108.126	11.766	802.334	88.479

13. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

TIFA merencanakan untuk memindahkan kantornya ke Jakarta Selatan, Indonesia. Di bulan Februari 2013, anggota dewan TIFA menyetujui untuk menjual kantor TIFA. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, aktivitas penjualan masih dalam proses.

14. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dikarenakan aktivitasnya, TIFA terpapar pada risiko keuangan tertentu: risiko pasar dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko TIFA secara keseluruhan berfokus untuk meminimalisir efek yang berpotensi merugikan aktivitas TIFA melalui pengawasan yang ketat terhadap lingkungan operasi dan keuangannya.

Faktor-faktor risiko keuangan

Risiko pasar

TIFA terpapar pada risiko selisih kurs

yang timbul dari berbagai transaksi mata uang asing, khususnya Dolar AS. Untuk mengelola risiko ini, TIFA meminimalisir periode penyimpanan kas dalam Dolar AS yang diterima dari donatur dengan segera menggunakan kas tersebut untuk proyek yang telah disepakati.

Risiko likuiditas

Manajemen risiko likuiditas mengimplikasikan tersedianya kas dan setara kas untuk memenuhi perjanjian dana bantuan kepada penerima dana bantuan. TIFA mengelola risiko

likuiditasnya dengan mengawasi arus kas secara berkesinambungan, mengamati prakiraan yang bergulir atas kebutuhan likuiditas TIFA dan mengantisipasi tanggal jatuh tempo piutang dari donatur dan utang dana bantuan.

Estimasi nilai wajar

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, nilai tercatat kas dan setara kas, piutang dari donatur, dan utang dana bantuan mendekati nilai wajarnya karena instrumen tersebut bersifat jangka pendek.

*) Laporan keuangan Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") ("USD") disajikan hanya untuk kemudahan bagi para pembaca dan bukan bagian dari laporan keuangan. Lihat Catatan 3 untuk dasar penjabaran.

15. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara berkesinambungan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan

TIFA membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, secara definisi, jarang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi

dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini:

Kewajiban imbalan kerja

Nilai kini kewajiban imbalan kerja bergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto meliputi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi-asumsi ini akan mempengaruhi nilai tercatat

kewajiban imbalan kerja. Asumsi-asumsi kunci kewajiban imbalan kerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Penyusutan aset tetap

Manajemen menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan untuk aset tetap yang bersangkutan. Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan ketika masa manfaatnya berbeda dari yang diestimasi sebelumnya, atau akan menghapus atau menurunkan nilai aset yang usang secara teknis atau aset non-strategis yang telah dihentikan penggunaannya atau dijual.

*) Laporan keuangan Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS") ("USD") disajikan hanya untuk kemudahan bagi para pembaca dan bukan bagian dari laporan keuangan. Lihat Catatan 3 untuk dasar penjabaran.